

## BAB 4

### Daerah Perlindungan Laut, Menjadi Konservasionis

*Mboo kita ifi-ifi menjaga sininyo bayar-boe patig kaide iluoku kilat,  
Neoboong/neobius/potas/tubele.  
Ire molelet mongkonaat urannu adat/kampung.*

Mari kita semua menjaga karang dan *rep* yang ada di Teluk Kilat,  
jangan di-bom/jangan di-bius/potas/tuba.  
Siapa melanggar akan dikenai sanksi kampung/adat.

Kalimat dalam versi bilingual, yaitu bahasa Bobongko dan Indonesia, tersebut terbaca dengan jelas pada media papan warna hijau berukuran sekitar 1,5 x 1,5 meter. Papan tersebut ditempelkan pada sebatang tiang kayu yang ditancapkan ke dalam pasir di tengah perairan Teluk Kilat, dengan ketinggian sekitar 3 meter di atas permukaan air, menghadap pintu masuk teluk Kilat. Karena ditulis dengan menggunakan cat putih, tiap kata pada papan berwarna hijau tersebut masih mudah terbaca pada jarak hingga 50 meter.

Saat membaca isinya saya menangkap bahwa tulisan di atas adalah sebuah peringatan, sebuah ‘hukum’ atau aturan yang disampaikan oleh orang-orang di Lembanato dan Matobiai tentang bagaimana seharusnya seseorang memperlakukan terumbu karang atau ‘rep’ yang ada di Teluk Kilat. Pemberian sanksi kampung atau adat yang disebutkan merupakan cara yang mereka gunakan untuk memperoleh kepatuhan setiap orang terhadap aturan yang dibuat. Menurut para pembuat papan tersebut, semua orang, baik penduduk Teluk Kilat maupun dari luar harus mengikuti peraturan tersebut. Makanya mereka merasa perlu menerjemahkannya pula dalam bahasa Indonesia seperti di atas.

Papan peringatan tadi, orang-orang di kepulauan Togeian biasa menyebutnya ‘nambor’ untuk benda-benda seperti itu, dibuat oleh beberapa orang penduduk Lembanato yang terlibat dalam program pengembangan Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang dijalankan Conservation International Indonesia (CII). Agak jauh dari lokasi nambor, terpasang pula satu nambor lainnya yang dibuat penduduk Matobiai yang ikut dalam dalam kegiatan yang sama. Isi tulisannya pun sama.

Sejak tahun 2004, CII memilih untuk mengembangkan program pembuatan Daerah Perlindungan Laut (DPL) pada dua lokasi di kepulauan Togeian, yaitu perairan Teluk Kilat di bagian utara pulau Togeian, dan di perairan seitar desa Kabalutan yang berada di sebelah selatan pulau Talatakoh. Saya adalah salah seorang dari CII yang ikut merancang dan menjalankan program pengembangan DPL ini bersama penduduk di dua lokasi ini. Saya dan beberapa teman CII di Palu ketika itu yakin bahwa melalui DPL, masyarakat di Teluk Kilat bisa mendapat pengakuan secara legal dari pemerintah daerah kabupaten Tojo Una-Una untuk mengelola sumberdaya alam di sekitar desa mereka.

Salah satu alasan melakukan kegiatan perlindungan karang melalui pembentukan DPL ini adalah karena adanya keluhan dari beberapa penduduk Lembanato dan Matobiai tentang makin seringnya kegiatan mencari ikan dan hasil laut lainnya yang menggunakan bahan peledak (babom) dan racun sianida (babiuis). Selain babom dan babiuis, beberapa nelayan di kepulauan Togeian juga menggunakan bubuk potas untuk menangkap ikan. Alasan lainnya, DPL merupakan bentuk pengelolaan sumberdaya laut yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya karena biasanya wilayah yang dijadikan DPL tidak terlalu luas dan letaknya berdekatan dengan pemukiman penduduk. Khusus di Teluk Kilat, DPL tidak hanya mencakup kegiatan perlindungan terumbu karang, tetapi juga areal hutan mangrove yang ada di dalamnya. DPL yang dikembangkan CI juga dilakukan di perairan Kabalutan, dengan proses dan bentuk kegiatan yang serupa. Bedanya, DPL di Kabalutan hanya terfokus pada perlindungan wilayah-wilayah terumbu karang yang ada di sekitar desa.

Bagian ini akan membahas secara khusus tentang program konservasi yang dilakukan oleh CII bersama sekelompok orang Bajo di Kabalutan. DPL hanya merupakan salah satu pintu masuk bagi saya untuk melihat bagaimana ideologi konservasi alam diterapkan dalam sebuah masyarakat di kepulauan Togeian, bagaimana pengetahuan-pengetahuan tentang konservasi alam dipindahkan dan diterima di antara para aktor yang terlibat di dalamnya, serta bagaimana konservasi alam pada akhirnya dimanfaatkan dalam proses artikulasi identitas sosial oleh orang Bajo di Kabalutan yang ikut serta dalam pengembangan DPL.

## 4.1. Konservasi Alam di Kabalutan

### 4.1.1. Batu, hewan atau tumbuhan?

Sekitar pukul 08.00 pagi, di dalam satu kelas di Sekolah Dasar desa Bungayo, udara dalam ruangan terasa cukup pengap dan riuh oleh sekitar lebih dari 150 orang siswa SD dari semua jenjang kelas. Mereka berkumpul saat itu untuk menghadiri sebuah acara pendidikan konservasi alam yang dilakukan oleh CII. Di sisi kelas berjajar para guru duduk memperhatikan acara sambil sesekali menenangkan suara anak-anak murid yang dianggap sudah terlalu bising. Mereka menatap pada satu sosok 'aneh' di muka kelas namun cukup mereka kenal, yaitu 'maming'.

Maming adalah sebutan orang kepulauan Togeana untuk ikan Napoleon wrasse (*Cheilinus undulatus*). Orang Bajo menyebutnya dengan istilah langkoe'. Ikan ini termasuk jenis ikan yang hidup di terumbu karang, menjadi impian para nelayan untuk ditangkap karena harganya saat itu mencapai Rp. 200.000 per kilogram. Ikan ini, bersama beberapa jenis ikan terumbu karang lainnya, diekspor ke Hongkong atau Singapura sebagai menu restoran bagi kelompok menengah atas di sana karena harganya yang cukup mahal. Namun, maming yang ada di depan murid-murid SD Bungayo ini hanyalah maskot, sebuah 'tokoh konservasi' yang dikembangkan oleh CII untuk menyampaikan pengetahuan konservasi. Maskot tersebut diberi nama Undul (singkatan dari *undulatus*, nama latin dari maming), agar mudah diingat oleh orang. Wujudnya hanya manusia yang menggunakan kostum berbentuk ikan maming.

Saya berdiri di sebelah Undul yang terus menari-nari dan bersalaman dengan beberapa murid yang tertawa karena menganggapnya lucu. Udara dalam ruangan sangat pengap. Di kepulauan Togeana, pada jam seperti ini matahari memang cukup terik. Ruang kelas beratap seng dan dipenuhi murid SD ini menambah suasana pengap tersebut. saya mengusap keringat yang menetes di dahi dan leher. Setelah suasana riuh mulai reda, dan para murid telah puas berkenalan dengan Undul, saya berbicara kembali menggunakan mikrofon yang disambungkan pada sebuah radio tape merek Sony warna hitam. "Anak-anak, ada pertanyaan dari Undul. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah", kata saya sambil mengangkat tinggi-tinggi sebuah pin warna kuning bergambar ikan maming.

Suasana kembali riuh oleh suara anak-anak yang menunjuk tangan sambil mengatakan “saya, pak...saya, pak”. Mereka berebut mengangkat tangan, sebagian bahkan berjalan mendekati saya, agar saya bisa melihat dan menunjukkannya. Padahal, pertanyaan belum saya ajukan. “Pertanyaannya begini, dengar baik-baik...karang itu hewan, batu, apa tumbuhan?”, tanya saya kemudian. Suara semakin riuh dalam kelas hingga akhirnya saya menunjuk salah seorang anak. “Batuuu...”, kata anak tersebut. “Kurang tepat, tapi tetap dapat hadiah”, jawab saya sambil memberikan sebuah poster warna kuning bergambar ikan maming. “Siapa lagi yang bisa jawab?”, tanya saya kemudian. “Tumbuhan, pak”, kata seorang murid yang saya tunjuk. “Kurang tepat, tapi dapat poster...”, kata saya. Pada akhirnya, tersisa satu jawaban. Siapa pun yang menjawab akan mendapat sebuah pin. “hewan, pak”, kata salah seorang murid yang akhirnya terpilih. Saya pun memasang sebuah pin pada kemeja seragam sekolahnya, pada bagian dada sebelah kiri. Ia kembali ke tempat duduknya sambil tertawa lebar, sementara yang lain tampak terkagum-kagum melihat pin tersebut. Pada akhir acara, sebuah lagu anak-anak diperdengarkan lewat radio tape yang saya bawa. Lagu tersebut ciptaan Arpan Hasan Basri, seorang guru di SD desa Lembanato. Syair lagu tersebut saya tulis pada sebuah karton tebal dan ditempelkan pada papan tulis agar semua murid dan guru yang hadir dapat membacanya. Setelah berlatih beberapa kali, akhirnya saya, guru-guru dan murid-murid SD Bungayo menyanyikan lagu tersebut bersama-sama. Sebagian syairnya berbunyi:

*Alamku, Togeanku, pujaan kami semua.  
Jangan kau bersedih, jangan kau menangis, kami tetap menjagamu.  
Alamku, Togeanku yang indah. Menyimpan banyak pemata.  
Jangan dirusakkan, hentikan pemboman, hindarilah pembiusan.<sup>1</sup>*

Lagu di atas telah direkam dalam sebuah kaset. Ada dua lagu lainnya yang juga direkam dalam kaset tersebut, yaitu lagu dangdut berjudul *Maming Cintaku* ciptaan Asri Saudang dan Risno dari desa Kabalutan. Satunya lagi lagu dalam nada gambus berjudul *Syair Alam*, ciptaan (alm) Bahmit Rahman, seorang nelayan suku Bajo asal Kabalutan. Ketiga lagu ini bercerita tentang hal yang

<sup>1</sup> Judul lagu: *Lestari Alamku*. Syair dan nada: Arpan Hasan Basri. Aransemen musik: Hais-Citra Electone Palu. Vocal: Chika Rahmita.

sama: pelestarian alam kepulauan Togean. Syair tiap lagu mengandung beberapa kata yang sama, yaitu: terumbu karang, pemboman dan pembiusan ikan, serta pelestarian alam. Ada sekitar 1000 keping kaset yang buat oleh CII dan disebarikan ke penduduk dan SD yang ada di kepulauan Togean. Sebagian lagi dibagikan kepada kantor-kantor pemerintah kabupaten Poso serta seluruh kecamatan di kepulauan Togean.

**Gambar 4.1. Undul, mentransfer pengetahuan global tentang alam**



Sumber: Conservation International Indonesia

Seperti di SD Bungayo tadi, lagu ini juga dinyanyikan bersama murid-murid lain di 60 SD yang ada di kepulauan Togean. Saya, dan beberapa teman, merupakan aktor-aktor yang berhubungan langsung dengan mereka ketika kegiatan kampanye konservasi oleh CII ini dilakukan. Di ke 60 SD itu pula pertanyaan-pertanyaan tentang terumbu karang diajukan. Dengan cara yang serupa, tiap murid yang menjawab, baik dianggap salah maupun benar, akan mendapat pin atau poster bergambar maming. Satu hal yang juga cenderung serupa adalah jawaban murid-murid tersebut atas pertanyaan: apakah terumbu

karang itu adalah batu, hewan, atau tumbuhan? Mereka akan menjawab: 'batu'. Tiap kali itu pula, saya dan teman-teman harus menjelaskan kepada mereka bahwa terumbu karang adalah 'hewan' laut. Kami pun membuka beberapa gambar terumbu karang, menunjukkan pada mereka bagian mana yang disebut mulut karang, apa makanannya, bagaimana mereka bertelur, serta apa saja yang dapat membuat mereka mati. Bagi CII dan kami, karang adalah hewan laut, sesuatu yang hidup, bernyawa, makan, melakukan reproduksi, dan mati akibat berbagai hal.

Sebuah survey sosial yang dilakukan CII pada tahun 2001 menghasilkan kesimpulan bahwa hampir seluruh responden, dari 500-an kuesioner yang terkumpul, menyatakan bahwa 'karang' adalah 'batu'. Terlepas dari adanya kekeliruan dalam penulisan pertanyaan atau persepsi responden terhadap bunyi pertanyaan yang diajukan sebagaimana biasa terjadi pada metode survei sosial dengan kuesioner, dalam pembicaraan dengan beberapa informan agaknya penyamaan konsep 'batu' dengan terumbu karang memang menjadi pengetahuan sebagian besar orang-orang kepulauan Togean. Ini menggambarkan adanya perbedaan yang sangat jauh antara pemahaman orang-orang kepulauan Togean dengan konsep 'karang' yang dimiliki oleh staf CII. Bagi orang-orang di kepulauan Togean, terumbu karang adalah sesuatu yang statis, tidak hidup, juga tidak bergerak, seperti halnya batu.

Hasil survey tersebut pada akhirnya mendorong staf CII di kepulauan Togean untuk memberikan pengetahuan tentang terumbu karang sebagaimana dipahami oleh para ahli biologi atau pekerja LSM konservasi alam lainnya. Pengetahuan-pengetahuan tersebut disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan, kepada semua kelompok sosial di seluruh desa di kepulauan Togean. Siswa SD, perempuan, nelayan, petani, pemimpin agama, hingga pegawai pemerintah adalah orang-orang yang menjadi target penyampaian informasi tersebut. Media penyampaian informasi yang digunakan juga beragam, mulai dari ceramah di SD-SD, pertunjukan panggung boneka, poster, baliho, brosur, lembar khotbah Jum'at, pin (*badge*), tabloid, komik, T-shirt, kaset berisi lagu-lagu konservasi alam hingga siaran radio di RRI Sulteng dan Gorontalo. Saat itu, hingga tahun 2003, kepulauan Togean seperti dibombardir oleh pesan-pesan konservasi: "selamatkan

terumbu karang...hentikan pemboman dan pembiusan ikan”. Salah satunya lewat cara yang saya dan teman-teman dari CII lakukan di sekolah dasar tadi.

Sejak dahulu penduduk di kepulauan Togeang memang menyebut karang dengan ‘batu’ atau ‘rep’ (asal kata dari *reef* yang banyak dikenalkan oleh para wisatawan, pengelola dive resort, dan peneliti). Dalam bahasa Bobongko terumbu karang disebut dengan *patig*, sedangkan orang Bajo menyebutnya *sappa*. Bagi masyarakat di kepulauan Togeang karang merupakan sumber bahan bangunan. Jenis-jenis karang keras (*hard coral*), baik yang secara biologis dianggap masih hidup maupun mati, diangkat dari dasar laut untuk dijadikan pondasi bangunan atau untuk menimbun lahan-lahan yang dianggap terlalu rendah sebelum mendirikan bangunan. Praktek pengangkatan batu karang ini disebut dengan *bakubik*.

Pada tahun 2003, satu kasus yang menarik bagi CII terkait dengan relasi pengetahuan masyarakat dengan apa yang mereka lakukan terhadap karang ini adalah ketika membaca Peraturan Desa (Perdes) Kabalutan tentang penanganan praktek pemboman dan pembiusan ikan. Kepala desa memperlihatkan kepada saya, seakan ingin menunjukkan rasa bangga karena berhasil membuat sebuah Perdes, salah satu ketentuan tentang sanksi terhadap penduduk Kabalutan yang melakukan pemboman atau pembiusan. Tujuannya adalah untuk memberi efek jera terhadap pelaku karena telah merusak terumbu karang. Dituliskan dalam sanksi tersebut bahwa setiap orang yang terbukti melakukan pemboman atau pembiusan akan dikenai sanksi berupa *bakubik* sedikitnya 1 meter kubik ‘batu’ karang. “Batu-batu itu nanti dipakai untuk desa, untuk pembangunan mesjid, jembatan, dermaga atau jalan. Pokoknya buat kepentingan desa juga”, kata kepala Desa menjelaskan. Saya dan staf CII lainnya melihat aturan tersebut justru menggambarkan sebuah ambivalensi. Di satu sisi peraturan desa ingin melindungi terumbu karang dari kerusakan, namun sanksi yang diberikan justru menyebabkan karang-karang tadi tidak hanya hancur melainkan hilang dari laut karena dipindahkan ke desa.

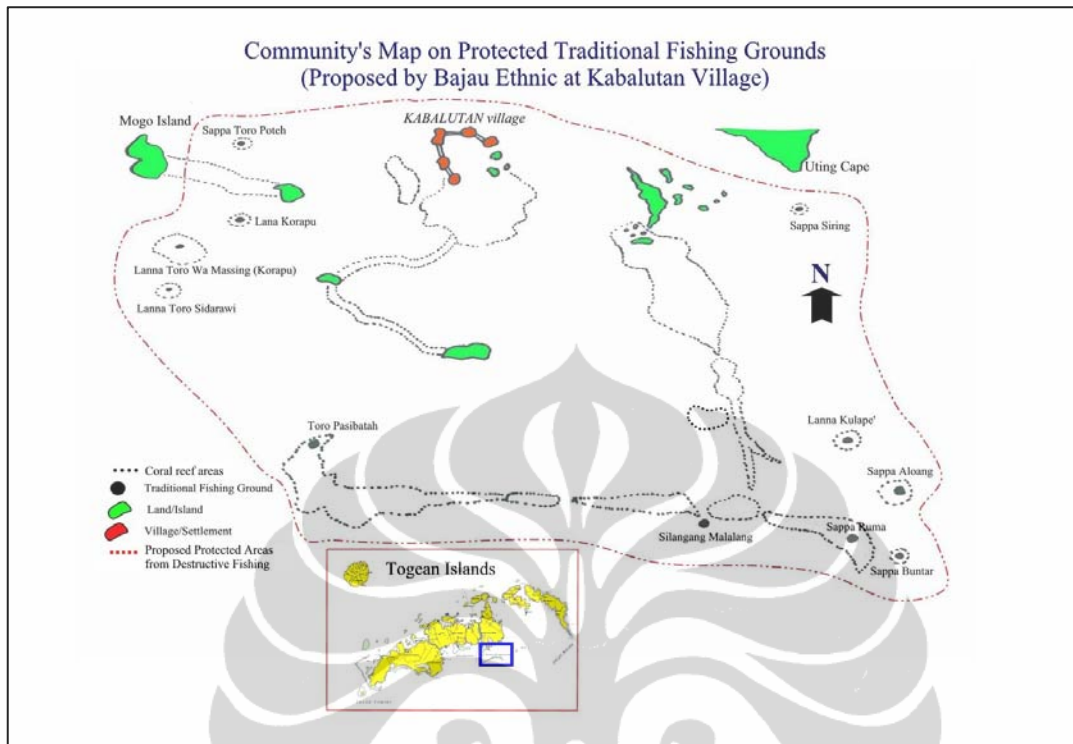
Rekan saya, seorang sarjana biologi, yang memiliki pengalaman meneliti terumbu karang di kepulauan Togeang mengatakan bahwa terumbu karang yang mati akan ditumbuhi kembali dengan karang-karang hidup, selama benih karang

(*planula*) masih tersedia di sekitarnya. Namun, jika karang yang telah mati diangkat atau dipindahkan dari laut untuk dijadikan bahan bangunan (*bakubik*), maka tempat yang ditinggalkannya akan hanya berupa pasir sehingga *planula* kehilangan substrat atau media untuk menempel dan tumbuh menjadi koloni karang baru. Menurutnya, proses *recovery* atau pemulihan terumbu karang sangat sulit terjadi jika *bakubik* terus dilakukan. Saya sangat mempercayai ucapan teman saya tersebut, setidaknya karena mengetahui latar belakang pendidikan serta pengalamannya. Ketika hal ini saya sampaikan kepada kepala desa, ia pun membatalkan sanksi *bakubik* tersebut. Namun, kepala desa dan beberapa nelayan tua tetap bersikukuh untuk mengembalikan 'keberlimpahan' ikan pada lokasi-lokasi terumbu karang tempat mereka mengail ikan kerapu. "Dulu banyak ikan dekat desa. Sekarang so hancur lantaran dorang 'bong' [bom], potas", ucap Puah Ilong.

Sebuah pertemuan sejak pagi hingga sore hari kemudian dilakukan di rumah kepala desa. Pertemuan tersebut dihadiri oleh hampir 30 orang nelayan di desa Kabalutan, termasuk di dalamnya beberapa orang nelayan yang selama ini hampir selalu menggunakan bom atau potasium sianida untuk menangkap ikan. Dalam pertemuan ini, sekelompok nelayan yang berusia lanjut menyampaikan protes mereka, ada di antaranya ada yang memaki-maki, pada pelaku pemboman dan pembiusan ikan yang duduk di deretan paling belakang. Perdebatan beberapa kali terjadi. Saya, yang diminta oleh kepala desa untuk menjadi pemandu pertemuan tersebut, akhirnya meminta para nelayan untuk menentukan apa keinginan mereka, terutama para nelayan yang menghendaki pemboman dan pembiusan tidak dilakukan di sekitar desa, di mana mereka selama ini mengambil hasil laut. Kesepakatan akhirnya tercapai, yaitu nelayan Kabalutan tidak boleh melakukan pemboman dan pembiusan ikan pada sebelas lokasi tempat mencari hasil laut di sekitar Kabalutan. Mereka juga menggambar peta kesebelas lokasi tersebut lengkap dengan nama-nama tempat tersebut, yaitu: Lana Toroh Wa Massing, Toroh Potei, Lana Toro Sidarawi, Sappa Matilla, Sappa Ruma', Lana Kulape, Sappa Buntar, Sappa Pasibatang, Sappa Silangang Malalang, Sappa Siring, dan Sappa Aloang (lihat peta).



**Gambar 4.2. Peta Daerah Perlindungan Laut di Kabalutan**



Sumber: digambar oleh penduduk Kabalutan, telah diolah kembali oleh CII-Palu

Kesebelas lokasi ini pun disepakati oleh kelompok nelayan yang biasa melakukan pemboman dan pembuisan di sekitar desa. Tak hanya itu, kepala desa juga menyepakati untuk membuat sebuah Perdes yang mengatur perlindungan kesebelas lokasi terumbu karang ini. Peta dan hasil rapat inilah yang kemudian menjadi titik awal mengapa CII pada akhirnya memilih membentuk DPL dalam program konservasinya.

Pada akhir pertemuan, (almarhumah) Mbo Aiba, wanita tua yang hanya mengail dengan mendayung *lepa* (perahu kecil) memegang lengan saya sambil berkata lirih: "Biar dorang babom babius di tempat lain, asal jangan di sini. Biar itu buat torang yang so tua-tua ini". Secara psikologis, saya memang tersentuh dengan ucapannya. Ucapan yang agak serupa juga pernah diucapkan Puah Ilong pada saya di rumahnya, "tolong bantu saya, pak Jaya. Kalo dorang babius terus, makin susah saya bacari [mengail]". Saya pun agak kaget manakala (almarhum) Puah Ilong ikut serta dalam rapat di rumah kepala desa. Dia, termasuk orang yang hampir tak pernah keluar rumah kecuali pergi mengail atau urusan keluarga.

Selama saya bekerja di Kabalutan, tak pernah sekalipun Puah Ilong hadir dalam pertemuan-pertemuan seperti itu, meski hanya sekedar mendengar. Tergambar dalam pikiran saya ketika itu, orang seperti Puah Ilong, Mbo Aiba dan nelayan berusia tua lainnya bersusah payah mendayung perahu menuju lokasi pemancingan ikan yang semakin jauh dari kampung. Pikiran ini tercampur dengan tugas yang harus saya kerjakan, menerapkan pengetahuan tentang alam dan konservasi sebagaimana saya pelajari dari para ilmuwan di dalam CI.

#### **4.1.2. DPL: Visi global demi kepentingan ‘lokal’?**

Bagi staf CI yang berada di Palu, usulan nelayan untuk melindungi lokasi terumbu karang adalah sebuah inisiatif tingkat lokal (*local initiative*), sebuah bentuk dari konservasi dari bawah (*bottom up conservation*) yang memiliki persinggungan dengan tujuan-tujuan konservasi yang dimiliki CI. Keinginan dan kesepakatan nelayan di Kabalutan merupakan salah satu syarat penting di mana ‘keterlibatan masyarakat lokal’ dalam sebuah program konservasi dapat dijalankan. Namun, persepsi tersebut tak mudah untuk diwujudkan dalam sebuah aktivitas konservasi di Kabalutan. Setidaknya, menyatukan cara pandang CI sebagai sebuah LSM trans-nasional dengan keinginan nelayan Kabalutan tak bisa dilakukan begitu saja. Perlu proses-proses sosial di mana negosiasi dilakukan. Sebagai sebuah organisasi, CI memiliki tujuan-tujuan konservasi alam yang dikaitkan dengan keanekaragaman hayati di dunia. Sementara itu, nelayan-nelayan di Kabalutan menginginkan perlindungan terhadap lokasi mencari hasil laut yang dianggap mulai terancam oleh aktivitas babom dan babiuis. Para staf CII yang bertugas di kepulauan Togeian harus menghadapi dua kepentingan ini. Di satu sisi dituntut untuk mencapai tujuan konservasi global yang ditetapkan CII, di sisi lain mereka merasa perlu membantu nelayan Kabalutan agar lebih mudah dalam mencari hasil laut. Mereka juga adalah orang-orang yang telah menjalin hubungan sosial di luar ‘kerja’ mereka, yaitu sebagai teman bagi orang-orang Bajo di Kabalutan. Posisi para staf CII di kepulauan Togeian ini pada akhirnya menjadi sangat strategis dalam merangkai kepentingan-kepentingan nelayan Kabalutan dengan CII sebagai organisasi. Lebih jauh lagi, dalam konteks ini, CII tidak bisa dipandang secara ‘monolitik’ sebagai sebuah entitas utuh, melainkan

harus dilihat pada tataran peran dan kepentingan para aktor yang bernaung di dalam organisasi ini.

Sepanjang tahun 2002, saya dan staf CII kantor Palu menyampaikan peta dan kesepakatan hasil rapat di rumah kepala desa kepada kantor CII di Jakarta dan Washington DC. Sesuatu yang sangat saya sadari ketika itu adalah apa yang disepakati nelayan Kabalutan didorong oleh kebutuhan mereka akan hasil laut yang dianggap semakin sulit diperoleh. Bagi CI, hasil akhir dari kegiatan konservasi harus berujung pada tiga tujuan utama, atau yang disebut sebagai *CI's Goals*, yaitu: habitat terlindungi (*habitat protected*), koridor konservasi tercipta (*corridor created*), dan dan kepunahan spesies dihindari (*species extinction avoided*). Seorang teman saya di CI Jakarta pernah berseloroh mengatakan bahwa ketiga tujuan tersebut adalah 'agama' CI.<sup>2</sup>

Ketiga visi ini pula yang saya dan staf CI Palu lainnya harus jelaskan keterkaitannya dengan rencana perlindungan 11 lokasi terumbu karang yang diusulkan. Hal ini dilakukan agar CI di Washington atau Jakarta dapat menyetujui dan memberi dukungan terhadap usulan tersebut, dalam hal ini adalah memberikan dana untuk pelaksanaan kegiatan. Akan tetapi, meski ketiga visi tersebut telah memiliki keterkaitan, CI Washington masih melihat apakah sebuah program memiliki efek terhadap perlindungan keanekaragaman hayati pada skala global, atau dikenal dengan konsep 'scaling up'. Dalam hal ini, pada akhirnya CI Washington DC lah yang memiliki otoritas dalam menentukan apakah sebuah program di berbagai negara atau tempat perlu didukung atau tidak. Para ahli biologi dan pencari donor (*fund managers*) menentukan apakah sebuah usulan program memiliki dua aspek penting, yaitu: efek biodiversitas (*biodiversity justification*) serta peluang untuk menarik donor (*funding opportunity*). Inilah dua hal yang selama ini dihadapi oleh para staf CII yang bekerja di kepulauan Togean.

---

<sup>2</sup> Ketiga tujuan (*goals*) ini telah disampaikan oleh para petinggi CI di Washington DC kepada seluruh staf CI di negara manapun berada. Di Indonesia, transfer pengetahuan tentang konservasi, strategi konservasi dan tujuan konservasi yang akan dicapai CI dilakukan melalui berbagai pertemuan staf, baik pada acara annual meeting, strategic meeting maupun pelatihan-pelatihan. Satu atau beberapa orang staf CI dari Washington DC biasanya dihadirkan untuk menyampaikan segala strategi yang telah menjadi keputusan di tingkat *top management* CI di AS. Pertemuan-pertemuan seperti itu merupakan proses di mana cara memandang alam, bagaimana interaksi antara manusia dan alam harus dilakukan, serta siapa saja aktor-aktor yang akan dilibatkan dalam sebuah kegiatan konservasi disampaikan oleh orang-orang CI di Washington kepada staf di Indonesia.

Menurut Chapin (2004) ada tiga strategi pendanaan yang dikembangkan oleh LSM internasional seperti TNC, CI dan WWF, yaitu: memformulasikan misi konservasi mereka dengan memperluas skala konservasi, melirik sumber pendanaan pada lembaga-lembaga multi-lateral dan bilateral, serta memasukkan sektor usaha multi-nasional (terutama yang ekstraktif terhadap sumberdaya alam) sebagai pendukung pendanaan. Pada awal berdirinya, CI menggunakan konsep *site-based project* yang mengembangkan program-program konservasi pada daerah-daerah yang sangat spesifik, habitat di mana spesies-spesies hewan endemik dan dilindungi perlu untuk diselamatkan. Namun, pada akhir tahun 1990-an, CI menerapkan konsep *Hotspot* yang memiliki cakupan area yang lebih luas ketimbang *site project*. Meski *hotspot* tetap digunakan, pada awal 2000-an konsep '*biodiversity corridor*' pun digunakan yang lebih mengacu pada keterkaitan antara satu area konservasi dengan area konservasi lainnya. Untuk konservasi laut, CI mengembangkan apa yang dinamakan sebagai *Seascape*. Hal ini dapat dianggap sebagai salah satu strategi lembaga-lembaga konservasi dalam memperluas skala konservasi mereka.

Sejak 1999, program CI di kepulauan Togean telah diusulkan untuk ditutup atau dihentikan karena dianggap tidak mampu menarik dana-dana dari donatur. Akar masalah tersebut karena program CI di kepulauan Togean berskala kecil dan lebih banyak 'berkutat' pada persoalan-persoalan di tingkat masyarakat setempat, atau tidak memiliki relasi yang kuat dan rasional terhadap perbaikan kondisi biodiversitas di sana. Program-program CI harus diletakkan pada jaringan konservasi yang melintasi batas-batas kampung, kabupaten, bahkan negara. Program yang memiliki skala luas tersebut dianggap paling menarik bagi para donor di dunia. Untuk itu, CI memiliki strategi-strategi pemasaran program konservasi agar para donor tertarik untuk memberikan uang mereka bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan CI, misalnya dengan menggunakan konsep 'hotspot' dan 'corridor'. Dalam konteks ini, kepulauan Togean termasuk ke dalam *Wallacea Hotspot* yang juga menjadi bagian dari *The World's Coral Triangle*.

Apakah Kabalutan menarik bagi donor? Apakah usulan nelayan untuk melindungi 11 lokasi terumbu karang itu akan dianggap memberi kontribusi terhadap keanekaragaman hayati yang ada di dalam *Wallacea Hotspot* atau *Coral*

*Triangle?* Apakah apa yang dipikirkan oleh Mbo Aiba dan Puah Ilong memiliki relasi dengan bagaimana cara CI memandang konservasi alam dalam programnya? Hal ini salah satunya yang membuat hampir 2 tahun lamanya usulan perlindungan terumbu karang di Kabalutan tak kunjung mendapat dukungan dana dan program dari CI. Seorang rekan kerja saya di CII Jakarta pernah berkomentar saat saya menyampaikan rencana masyarakat Kabalutan membuat daerah perlindungan laut yang luasnya tak lebih dari 5.000 hektar.”*Community-based* itu gagal di dunia. Orang sudah *gak* tertarik lagi. Di Filipina, yang selama ini jadi contoh juga dianggap gagal. Susah ‘laku’ kalau kita masih pakai *community based conservation*. Kita harus kreatif. Kalau hanya 10, 20 hektar mana menarik. Donor lebih tertarik pada program yang ‘seksi’ atau luasnya jutaan hektar”, demikian komentarnya. Ucapan seperti ini hampir selalu saya dengar manakala program kepulauan Togeon mengajukan usul-usul kegiatannya karena masih menggunakan konsep *community-based conservation*.<sup>3</sup> Program Togeon selalu dianggap kalah dalam ‘persaingan’ memperebutkan dana-dana konservasi dibanding program CI lainnya di Indonesia atau negara lain. “CI juga mesti bersaing dengan TNC, WWF, WCS supaya dapat donor. Kalau CI presentasi soal Togeon, mana ada yang tertarik. Lain kalo misalnya yang dijual Raja Ampat [Papua], duit gampang karena seksi”, lanjut teman saya tadi.

Seksi, nilai jual, atau ukuran luas area yang akan dilindungi adalah sebagian dari kata-kata kunci yang selama ini menjadi ukuran bagi CI untuk memperjuangkan, lebih tepat ‘menjual’, sebuah program di hadapan para calon donor.<sup>4</sup> Kompetisi antarprogram dalam satu negara, antarprogram berbeda negara,

<sup>3</sup> Agrawal dan Gibson (1999) mengingatkan bahwa salah satu kegagalan dari pelibatan masyarakat dalam konservasi maupun pengelolaan sumberdaya alam adalah kekeliruan dalam memandang masyarakat sebagai sesuatu yang homogen, sebuah unit sosial yang kecil, dan terlepas dari peran kekuasaan yang dimainkan para aktor di dalamnya. Kritik Agrawal dan Gibson ini diarahkan pada pandangan bahwa konservasi berbasis masyarakat tidak efektif dalam melakukan perlindungan alam. Pada tulisan lain, Tania Li Murray menganggap kesalahan perspektif seperti ini bisa jadi tak hanya berlaku pada lembaga konservasi, tapi juga pada NGO yang memiliki gerakan dalam memperjuangkan hak masyarakat (adat), sebagaimana ia contohkan di Sulawesi Tengah (2002). Dalam antropologi, cara pandang terhadap masyarakat seperti ini cenderung menyebabkan peneliti berada dalam kondisi ‘noble savage’, konsep yang dikenal dalam pembahasan tentang *cultural relativism*.

<sup>4</sup> CI termasuk lembaga konservasi berbasis di AS yang cukup berkembang karena keberhasilannya menarik dana-dana dari berbagai lembaga atau yayasan yang bernaung dalam perusahaan transnasional, seperti World Bank, GEF, USAID, BP, EXXON, CEMEX, Gordon Moore (milik Intel), atau yayasan milik Bill Gates.

serta antarlembaga dalam sebuah atau beberapa negara telah mendorong lembaga-lembaga internasional dalam konservasi alam untuk merancang program-program mereka semenarik mungkin agar mendapatkan dana dari lembaga-lembaga donor. Semakin luas efek konservasi yang ditawarkan, semakin luas area yang akan dilindungi, serta semakin ‘terancam’ spesies yang akan diselamatkan, maka semakin besar peluangnya untuk menarik pihak donor.

Pada pertengahan 2003, sebuah konsultan bernama *Community and Conservation Investment Forum* (CCIF) menandatangani perjanjian kerjasama dengan CI Washington untuk melakukan *Conservation Options Assessment* di kepulauan Togean. Lembaga ini memiliki sebuah kantor di Bali, namun berbasis di AS. Sebelum kegiatan mengkaji pilihan konservasi ini dilakukan, perdebatan terjadi antara orang-orang dari CCIF dengan CI Indonesia yang ada di Palu soal rencana CCIF untuk melihat kemungkinan memberlakukan *conservation concession* di kepulauan Togean. Sekitar bulan Mei 2003, saya bertemu dengan salah satu staf ahli CCIF, seorang WN Belanda dengan latar belakang perikanan dan telah beberapa tahun bekerja dalam program konservasi laut, di Bali. Ketika itu, kami berdebat soal *conservation concession* yang ia tawarkan. Saya menolak strategi konservasi dengan cara tersebut karena akan mendorong CI atau lembaga konservasi yang memiliki dana menguasai satu wilayah tertentu di laut. “Tapi, kita akan memberikan insentif kepada masyarakat di sekitarnya, juga kepada pemerintah. Oleh karena itu, kita harus menghitung berapa dana yang diperlukan untuk melakukan konsesi seperti itu”, ujar staf CCIF tersebut.<sup>5</sup> Saya tetap bersikukuh karena model konservasi seperti itu tak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan PT. Walea Dive Resort di Tanjung Keramat atau PT. Cahaya Cemerlang di Teluk Kilat yang sampai saat itu masih mendapatkan protes dari LSM dan masyarakat setempat. Ini semacam privatisasi atas laut, meski untuk

---

<sup>5</sup> Staf CII di Palu melakukan penyelidikan tentang model *conservation concession* ini di beberapa tempat di dunia. Sejauh penyelidikan tersebut, *conservation concession* memang telah dilakukan oleh CI pada konservasi kawasan hutan di Guyana, Amerika Selatan. Akan tetapi, model ini belum pernah dilakukan pada kawasan laut. Staf ahli CCIF sendiri tidak bisa menunjukkan contoh keberhasilan *conservation concession* yang mereka jalankan, terutama di laut. Hal lain adalah adanya kecurigaan dari tim CI Palu bahwa CCIF merupakan lembaga yang bernaung di bawah sebuah perusahaan eksportir ikan hias. *Conservation concession* akan menjadi semacam HPH, di mana pemegang konsesi akan mengambil ikan hias yang ada di dalamnya untuk kepentingan ekspor. Hasil dari penjualan ikan hias inilah yang sebagian akan digunakan untuk membayar insentif bagi masyarakat dan pemerintah.

tujuan yang berbeda, yaitu konservasi.<sup>6</sup> Pada akhirnya, CCIF dan CI sepakat untuk tidak terfokus pada pencarian model *conservation concession*, melainkan mengkaji semua strategi yang paling memungkinkan bagi konservasi di kepulauan Togean.

Hasil dari kajian yang dilakukan CCIF dan CI menyimpulkan bahwa empat opsi strategi konservasi yang diusulkan adalah: mengembangkan mekanisme penegakan hukum terhadap para pelaku perusakan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku, melakukan *conservation incentive agreement* sebagai bentuk lain dari *conservation concession*, pengembangan ekonomi masyarakat yang dapat mengurangi aktifitas yang beresiko merusak terumbu karang, serta kombinasi di antara ketiga pilihan tersebut (Sundjaya, dkk., 2003). Dari keempat opsi tersebut, CCIF dan CI harus menentukan strategi mana yang diprioritaskan untuk dijalankan di kepulauan Togean. Apapun pilihannya, akan sangat menentukan kegiatan konservasi macam apa yang akan dijalankan CI kedepan di kepulauan Togean.

Dalam pemilihan prioritas ini, perdebatan terjadi antara CCIF dengan staf CI di Palu. Saya pun kembali berdebat dengan ahli perikanan dari CCIF, terutama dalam hal penegakan hukum, saat kami bertemu kembali dalam sebuah rapat di kantor CI Indonesia di Jakarta. Ahli tersebut berpendapat bahwa kerusakan sumberdaya alam di kepulauan Togean lebih disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum sehingga pelaku pemboman dan pembiusan leluasa melakukan aktivitasnya. Aparat kepolisian dianggap ikut bertanggungjawab karena terlibat kolusi dan suap dengan pelaku yang juga adalah nelayan setempat. Bagi saya saat itu, cara pandang ahli tersebut terlalu normatif. Saya mengatakan dengan agak emosional ketika itu: "kita harus melihat soal hukum ini pada dua sisi. Pertama, jika hukum dilihat sebagai aturan formal, maka kita akan hitam putih. Siapapun

---

<sup>6</sup> Penolakan saya terhadap *conservation concession* juga dipengaruhi oleh apa yang saya ketahui tentang teori 'tragedy of the common' dari Garret Hardin (1968). Hardin meyakini bahwa degradasi sebuah sumberdaya alam akan teratasi sejauh terjadi kepemilikan privat (*private property*) terhadap sumberdaya alam tersebut. Teori ini banyak mempengaruhi ahli-ahli ekonomi sumberdaya alam, terutama perikanan, saat mereka terlibat dalam merancang aturan-aturan pemanfaatan sumberdaya alam di laut, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Studi tentang hal ini dapat dilihat pada kasus pengelolaan perikanan di teluk Scortia, Canada yang ditulis oleh Melanie G. Wiber (2005). Rekan saya di CI mengatakan bahwa model *conservation concession* didukung oleh sekelompok ahli ekonomi di CI Washington yang mendukung privatisasi sebagai strategi konservasi alam.

yang melanggar aturan tertulis harus ditindak. Kalau begini, nelayan-nelayan itu akan ditangkap semua, karena mereka memiliki bukti paling kuat, bom terdengar, bahan-bahannya juga mudah ditemukan. Tetapi, kalau kita melihat hukum sebagai sebuah sistem, seperti mesin, kita harus melihat siapa-siapa saja yang menyebabkan penegakan hukum itu tidak berjalan. Apakah bupati berani menangkap aparat kepolisian yang terlibat? Apakah polisi mau menangkap para pengedar pupuk [bahan pembuatan bom ikan] dan tablet sianida yang dijual orang-orang Gorontalo dan Pagimana?”. Bagi ahli perikanan dari CCIF tersebut, penegakan hukum tetap harus diprioritaskan, dan menjadi dasar utama sebelum bentuk-bentuk kegiatan konservasi lainnya akan dilakukan. “Percuma kalau hukum tidak ditegakkan dahulu. Ini persoalan mendesak. Semacam shock therapy bagi pelaku pemboman dan pembiusan”, katanya tak kalah emosional. Perdebatan kami disaksikan oleh satu pengurus CCIF berasal dari San Fransisco, satu orang CI Washington DC, tiga orang staf CII Jakarta, dan seorang staf CI Palu. Mereka tak memberi reaksi, kecuali mencoba menengahi perdebatan antara saya dan ahli perikanan tersebut.

Pada akhirnya, CI dan CCIF sepakat untuk memilih opsi keempat, yaitu menetapkan sebuah area terumbu karang yang akan dijadikan kawasan konservasi di mana kombinasi antara penegakan hukum dan kegiatan ekonomi dilakukan bersama masyarakat. Apa yang disebut strategi kombinasi ini pada dasarnya merupakan upaya staf CII kantor Palu agar rencana nelayan di Kabalutan untuk melindungi 11 lokasi terumbu karang yang disepakati pada tahun 2002 dapat didukung oleh CI Washington. Maka, pada tahun 2004, CI Washington, lewat lembaga pendanaan internal mereka yang bernama *Global Conservation Fund*, menyetujui proposal yang dibuat oleh CI Palu untuk mengembangkan Daerah Perlindungan Laut (DPL) oleh masyarakat di dua lokasi, yaitu Kabalutan dan Teluk Kilat. Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun.

Dalam perencanaan program ditargetkan bahwa DPL Kabalutan dan Teluk Kilat akan menjadi model di mana masyarakat mengelola sendiri wilayah-wilayah sumberdaya alam di sekitar mereka. Dua lokasi ini pada tahun kedua, atau 2005, akan dipromosikan pada desa lain di kepulauan Togean, atau disebut pula dengan proses ‘duplikasi’. Apabila pada tahun ketiga telah terbentuk DPL di beberapa



desa lainnya, maka mereka akan dijalin dalam sebuah ‘jaringan DPL’ atau *community-based marine conservation network*. Saya dan teman-teman CI Palu membayangkan bahwa jaringan ini merupakan langkah awal untuk menunjukkan pada pemerintah daerah Touna bahwa masyarakat kepulauan Togeon memiliki praktek pengelolaan sumberdaya alam yang mempertimbangkan kepentingan pemanfaatan dan pelestariannya. Target akhirnya adalah, lokasi-lokasi DPL ini akan melahirkan sebuah Perda tentang pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat dan akan diadopsi kedalam RDTR kepulauan Togeon yang baru.<sup>7</sup> Mengenai soal ini, seorang staf CI Palu mengatakan:”Jika dalam RDTR ada wilayah-wilayah yang dialokasikan untuk perusahaan pariwisata atau budidaya mutiara, mengapa ini [DPL yang dikelola masyarakat setempat] tidak bisa diperlakukan serupa oleh Pemda?”.

Tahun 2004, akhirnya CII Palu dapat memulai program pembentukan DPL di Kabalutan dan Teluk Kilat. Beberapa kali pertemuan dilakukan dengan masyarakat, peta dibuat, serta penelitian kondisi karang dijalankan. Beberapa pelatihan monitoring terumbu karang juga dilakukan kepada kelompok pengelola DPL yang dibentuk di tiap lokasi. Selain itu, beberapa anggota kelompok dibiayai untuk melakukan studi banding untuk melihat kegiatan DPL yang dilakukan di desa Blonko, Tumbak dan Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. Masyarakat di dua lokasi ini juga diminta menentukan wilayah terumbu karang mana saja yang akan mereka jadikan sebagai zona inti, yaitu lokasi khusus yang sama sekali tertutup (*restricted*) untuk segala aktivitas manusia. Tujuannya adalah sebagai sumber penyedia bibit karang bagi lokasi di sekitarnya.

---

<sup>7</sup> Di sisi lain, rencana pembentukan jaringan DPL ini merupakan reaksi atas kegagalan Toloka dalam melakukan revisi RDTR melalui pemetaan partisipatif. Saya dan teman-teman CI Palu lebih menyukai membentuk praktek-praktek pengelolaan yang dapat ditunjukkan kepada pemerintah daerah sebelum akhirnya menuntut mereka agar lebih menerima ‘ruang kelola’ (terminologi yang selalu digunakan Toloka) masyarakat. Seorang staf CI Palu mengatakan:”Jika dalam RDTR ada wilayah-wilayah yang dialokasikan untuk perusahaan pariwisata atau budidaya mutiara, mengapa masyarakat setempat tidak bisa diperlakukan serupa?”.

**Gambar 4.3. Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Kabalutan**



Sumber: CII-Palu

Akhirnya, ditetapkanlah tiga lokasi zona inti, yaitu Toroh Sidarawi di Kabalutan, dan Manggavai serta Urung Dolom di Teluk Kilat. Akan tetapi, hasil penelitian biologi oleh CII Palu menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di seluruh lokasi zona inti tersebut termasuk kategori rusak. Namun, CII Palu tetap mengikuti keinginan masyarakat. “Yang penting tidak diganggu, dua tiga tahun akan *recovery*, karang tumbuh lagi dan ikan makin banyak. Tidak apa-apa”, argumen ahli biologi CII Palu kepada saya. “Tapi, kita mesti memberi alasan yang kuat ke CI [Washington dan Jakarta], kenapa karang rusak jadi zona inti?”, tanya saya<sup>8</sup>. Alasan-alasan biologi tersebut tak bisa ditemukan, kecuali alasan bahwa

<sup>8</sup> Apa yang saya khawatirkan ternyata menjadi kenyataan ketika Direktur CII Jakarta yang membawahi program konservasi laut datang mengunjungi DPL ini. Dalam laporannya ke CI Washington ia melaporkan bahwa kegiatan DPL oleh CII Palu tidak efektif karena kondisi zona inti hanya 22 hektar, terlalu dekat dengan kampung sehingga mudah terjadi pencemaran oleh limbah, serta kondisi terumbu karangnya rusak berat. Akan tetapi, dalam waktu enam bulan nelayan di Kabalutan mengaku bahwa mereka menjadi lebih mudah mengail dekat desa. Sekeliling Toroh Sidarawi mulai banyak didatangi nelayan yang akan mengail, padahal sebelumnya tak ada yang mau ke sana karena tak ada ikan. Pendapat nelayan ini dibantah sendiri oleh saya dan teman yang menjadi peneliti biologi. Kami berpendapat bahwa ikan yang mulai banyak di sekitar desa adalah akibat musim dan arus, bukan karena adanya DPL. Teman saya mengemukakan teori

DPL ini hanya sebagai model bagi masyarakat untuk melakukan konservasi terumbu karang secara mandiri. Akhirnya, pada tiga zona inti ini CII membantu masyarakat membuat batas zona dengan pelampung dan memberi papan peringatan (nambor). Di dekat zona inti CII dan masyarakat juga membangun pondok atau babaroh yang dapat digunakan untuk menjaga DPL sekaligus pula untuk nelayan berteduh saat badai. Babaroh di Kabalutan tak lama kemudian roboh hingga ke dasar laut. Seorang informan di Kabalutan, setelah CII mengundurkan diri dari Togean, memberitahu bahwa yang merobohkan babaroh tersebut adalah seorang pelaku pemboman yang bekerjasama dengan oknum polisi. Mereka merasa kegiatan DPL akan membatasi aktivitas babom dan babius yang selama ini mereka lakukan.

#### 4.2. Para ‘Konservasionis’

Para staf CII, juga YABSHI pada tahun-tahun sebelumnya, adalah aktor-aktor yang ikut membentuk pengetahuan orang Bajo tentang terumbu karang dan konservasi alam. Orang-orang seperti Rais, Puah Sofyan, dan beberapa orang Bajo lainnya di Kabalutan adalah aktor-aktor lain yang ikut membentuk konteks-konteks sosial bagi tindakan-tindakan konservasi yang akhirnya dianggap tepat dan dipilih oleh para staf CII di kepulauan Togean. Negosiasi-negosiasi aktor di dalam CII atau YABSHI tentang pendekatan konservasi terumbu karang di Kabalutan seakan menegaskan kembali argumen Celia Lowe (2006) bahwa gagasan ‘ilmiah’ yang universal tentang biodiversitas atau alam tak serta merta tersalurkan sebagaimana adanya ketika dibawa oleh para ilmuwan atau staf YABSHI dan CII. Relasi sosial yang terjalin antara orang-orang CII dan Yabshi dengan orang Kabalutan, juga Bobongko di Teluk Kilat, dalam rentang waktu cukup lama, telah menghasilkan nuansa-nuansa ‘partisipasi masyarakat’, ‘lokalitas’, ‘persahabatan’, dan ‘humanisme’, yang sesungguhnya berbeda dengan kaidah-kaidah mendasar dalam gerakan konservasi alam. Nuansa-nuansa seperti itulah yang oleh Lowe ikut memutar arah ‘ilmiah’ tentang konservasi alam kepada konteks-konteks sosial, atau disebut sebagai *the social turn* (Lowe, 2006:53-74).

---

bahwa kondisi terumbu karang paling cepat dapat pulih kembali sekitar 2-3 tahun. Tetapi kebanyakan nelayan membantah komentar kami.

Ketika DPL pada akhirnya dipandang oleh sebagian orang Bajo sebagai sesuatu yang ‘membanggakan’ dan memberi ruang yang jelas untuk membedakan mereka dengan para pelaku babom dan babius, kondisi ini bukan tak disadari sepenuhnya oleh staf CII. Konteks konservasi alam bagi artikulasi identitas etnik sesungguhnya juga telah dialami oleh CII dan YABSHI ketika mengembangkan ekowisata di Teluk Kilat bersama orang-orang suku Bobongko. Artikulasi identitas yang dilakukan oleh orang Bobongko tersebut malah mendorong staf CII dan YABSHI untuk melabelkan orang Bobongko sebagai para pelestari alam atau ‘konservasionis’. Untuk itu, saya mencoba mengawali pembahasan tentang orang-orang Bajo yang mengkonstruksi identitas melalui DPL ini dengan menampilkan relasi antara pembentukan identitas orang Bobongko dengan konservasi hutan bakau di Teluk Kilat. Hal ini untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana konservasi alam menjadi efektif bagi proses konstruksi identitas sosial seseorang atau kelompok.

#### **4.2.1. Antara London dan Lembanato**

Sepuluh lembar foto berwarna ukuran 10 R menempel berjajar pada dinding kayu ruangan bagian depan dan tengah rumah Ghalib yang terletak di ujung desa Lembanato. Foto-foto tersebut berdampingan dengan beberapa foto lainnya, poster, brosur dan *leaflet* tentang konservasi alam yang diterbitkan oleh berbagai organisasi. Sebagian foto tadi memperlihatkan Ghalib mengenakan jaket tebal berpose dengan latar belakang istana Buckingham, atau figur penjaga istana kerajaan yang siaga menggunakan pakaian khas warna merah dan topi bulu menjulang ke atas. Pada foto lainnya, Ghalib tampak tersenyum berpose di jembatan sungai Thames. Di kejauhan, di belakang Ghalib, terlihat bangunan gedung parlemen Inggris. Ada pula foto di mana Ghalib berdiri di sisi jalan raya kota London, di samping *phone booth* yang khas. Di belakangnya terlihat bus tingkat (*double decker*) warna merah dan taksi (*cab*) warna kuning di tengah lalulintas kota.

Foto lainnya menunjukkan Ghalib bersama seorang pemain alat musik rakyat Skotlandia yang mengenakan pakaian tradisional. Ada pula foto Ghalib diapit seorang pria kulit putih dan seorang pria Afrika berkulit hitam yang mengenakan pakaian tradisional. Ketiganya masing-masing memegang sebuah

plakat berbingkai. Salah satu foto menunjukkan Ghalib menerima sebuah pelakat dari seorang pria kulit putih yang mengenakan jas hitam. Di antara foto-foto tersebut, sebuah salinan plakat terbuat dari karton tebal menggantung di dinding kayu. Plakat itulah yang diterima Ghalib sebagaimana terlihat dalam foto tadi. Di atas plakat tertulis: “*British Airways Award 1999. Tourism for Tomorrow*”. Seluruh foto tersebut adalah hasil jepretan seorang staf CI Indonesia yang menyertai Ghalib saat acara penerimaan penghargaan tersebut di London pada pertengahan tahun 1999.

Ghalib Labatjo, lelaki berusia lebih dari 50 tahun, memiliki tiga orang anak, dan mantan seorang sekretaris desa. Ia seorang dari suku Bobongko yang sebagian hidupnya berkerja di kebun, memetik cokelat, menjaga padi, mengusir burung-burung *kea* yang sering mengganggu tanaman cokelatnyanya. Ia kadang mendayung perahu ke sisi-sisi hutan mangrove untuk mengumpulkan kalaumang, sejenis siput, lalu mengupas kulit dan mengambil dagingnya. Setelah itu, ia mendayung ke tengah teluk Kilat, menjadikan daging kalaumang sebagai umpan untuk mengail beberapa ekor ikan batu, untuk makan keluarganya. Ia kadang tampak memperbaiki perahu, mendampingi isterinya mengumpulkan *katude* (sejenis kerang) pada lumpur pekat kehitaman di tengah hutan mangrove, mencungkil dan menjemur kopra, atau *bacude* cengkeh (melepas bunga cengkeh dari tangkainya) bersama kerabat-kerabatnya di rumah.

Ghalib, seperti kebanyakan penduduk di Lembanato, melakukan itu semua dalam kesehariannya, di tengah mengurus anak-anaknya yang kini sudah mulai membantunya di kebun. Ia juga telah membayangkan masa depan anaknya yang masing-masing telah mendapat bagian dari kebun-kebun yang selama ini ia olah. Kebun-kebun tersebut telah ditanami kelapa, cokelat, cengkeh, dan tanaman lainnya sehingga dianggap cukup untuk menjamin kehidupan ekonomi ketiga anaknya. Ia merasa salah satu kewajibannya sebagai seorang ayah telah dilakukan.

Namun, dibanding yang lainnya, bagi orang-orang Lembanato Ghalib tak hanya seorang yang tergambarkan lewat aktivitas keseharian tersebut. Ghalib adalah juga satu-satunya orang Bobongko, bahkan mungkin di antara orang-orang di Kepulauan Togeang, yang pernah menginjakkan kakinya di Inggris, sebuah negara yang sejauh ini hanya dapat mereka bayangkan.

Ruangan di mana foto-foto tadi ditempelkan adalah tempat yang cukup sering didatangi oleh berbagai orang dengan berbagai keperluan. Ghalib adalah salah satu orang di Lembanato yang dianggap memiliki pengetahuan tentang orang-orang Bobongko di teluk Kilat, mengatasi masalah-masalah administrasi pemerintah desa, sampai kepada menyelesaikan konflik antara suami isteri. Tak mengherankan jika Ghalib sering dikunjungi orang-orang Bobongko yang tinggal teluk Kilat atau desa lain, pegawai pemerintah, aktivis LSM, para peneliti dari perguruan tinggi, bahkan mahasiswa dari Palu yang sedang menyelesaikan skripsi mereka. Ghalib hampir setiap hari berada di sekitar teluk Kilat. Ia bahkan pernah mengaku enggan mengunjungi Wakai pada hari pasar kecuali sangat terpaksa karena urusan yang tak tergantikan oleh orang lain. Tapi ia memiliki jaringan yang cukup luas di banding penduduk lainnya di Lembanato. Rumahnya kerap menjadi pilihan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan tentang masalah internal di desa, membahas rencana pelaksanaan proyek atau program dari pemerintah maupun LSM, hingga diskusi-diskusi politik saat menghadapi Pilkada atau Pemilu. Para staf CII dan YABSHI yang bertugas di kepulauan Togean adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut di rumah Ghalib. Hubungan mereka dengan Ghalib tak hanya terbatas pada pelaksanaan program-program konservasi, tapi kadang juga merupakan pertemanan di luar program.

Soal foto-fotonya saat di Inggris, Ghalib pernah bertutur: “Ini kerja keras orang-orang Bobongko, karena berhasil menjaga kelestarian hutan bakau di teluk Kilat. Saya masih ingat bagaimana orang-orang Bobongko di sini, waktu saya mau berangkat ke London. Mereka khawatir, karena London itu jauh. Malah ada yang minta jaminan pada teman-teman Sekber yang ada waktu itu, mereka harus bertanggung jawab kalau Pak Ghalib sampai tidak kembali lagi. Banyak orang di sini fikir, saya itu bakal diapa-apakan di sana...Tapi, setelah saya ke London ini, nama orang Bobongko jadi terangkat. Tidak cuma di Togean sini. Tapi ternyata di luar negeri. Gara-gara ada jembatan bakau itu, banyak orang asing datang lihat-lihat dan belajar kehidupan orang Bobongko. Waktu Gubernur datang meresmikan jembatan, orang-orang Kecamatan sebetulnya iri. Coba mas pikir, cuma di Lembanato ini desa yang pernah dikunjungi Gubernur”.

Lembanato dan London adalah dua tempat yang berjauhan dengan suasana yang berbeda, dan bahkan penduduk keduanya mungkin tak saling mengetahui di mana letak Lembanato atau London. Tapi, bagi Ghalib, London dan Lembanato adalah dua nama yang terhubung satu sama lain. Hutan bakau yang berkali-kali diucapkan Ghalib, seperti menjadi garis penghubung antara London dan Lembanato dalam konteks ini. Akan tetapi keterhubungan (*connectedness*) mungkin saja tak terjadi apabila hutan bakau tersebut hanya dipahami sebagai sebuah habitat alami, sebagai ‘sesuatu’ (*thing*) yang tidak melibatkan proses-proses sosial dalam pemaknaan terhadapnya. Proses sosial yang dimaksud adalah bagaimana sebuah konservasi pada akhirnya mengubah konstruksi sosial tentang hutan bakau (*mangrove*) bagi orang lain, termasuk orang Bobongko di teluk Kilat.

Hutan bakau adalah istilah yang umum digunakan di Indonesia. *Mangrove* adalah istilah lainnya yang lebih spesifik karena cenderung hanya dipakai oleh para peneliti biologi maupun kehutanan. Bagi orang Bobongko, hutan *mangrove* disebut dengan *wakatan*. Sedangkan orang di kepulauan Togeang kebanyakan menyebutnya *lolaro*. Istilah-istilah ini sedikit banyak mengacu pada hal yang sama.

Namun, saya tidak menggunakan bagian ini untuk membahas istilah-istilah tersebut lebih jauh. Saya hanya akan memperlihatkan, bagaimana *wakatan* atau *mangrove* mengalami konstruksi sosial melalui program konservasi, dan akhirnya memiliki kaitan dengan konstruksi identitas sosial bagi orang Bobongko di teluk Kilat. Saya akan meletakkan staf-staf CII dan YABSHI sebagai aktor-aktor yang ikut membangun pemahaman tentang *wakatan* tersebut melalui program konservasi alam di teluk Kilat.

Apa yang disebut jembatan bakau oleh Ghalib adalah sebuah konstruksi jembatan dari kayu yang dibangun melintasi hutan bakau di Luok Tingki, di muka Teluk Kilat. Meski tidak sendirian, pengembangan jembatan hutan bakau ini memang tak bisa dilepaskan dari peran Ghalib saat menjadi anggota sekaligus koordinator Jaringan Ekowisata Togeang (JET). Organisasi ini merupakan bagian dari proyek pengembangan ekowisata oleh Yabshi dan CII. Anggota anggota JET adalah para penduduk kepulauan Togeang yang memiliki usaha penginapan bagi

turis, ditambah petani atau nelayan yang ingin memperoleh pendapatan tambahan dari pariwisata (Suhandi, 1988).<sup>9</sup>

Gagasan membangun jembatan bakau tak hanya datang dari Ghalib, tapi juga staf Yabshi dan CII. Mereka menilai, hutan bakau di teluk Kilat harus dilindungi dari penebangan karena beberapa penduduk telah menjual kayu bakau kepada para penampung asal Gorontalo. Bagi YABSHI dan CII, ini adalah pesinggungan antara tujuan konservasi alam dengan peningkatan ekonomi penduduk. Bagi Ghalib, ini juga bisa menjadi sumber penghasilan lain bagi orang di Lembanato. Ia dan beberapa orang temannya di desa tak pernah membayangkan bahwa 'hutan bakau' yang selama ini hanya dianggap sebagai wilayah 'bapece' (berlumpur) tempat mencari kalaumang, katude, kayu dan akar bakau untuk membuat garam akan diminati orang asing dari negara lain (Sundjaya, 2004).

Ketika jembatan bakau benar-benar berfungsi, puluhan turis datang dan menikmati pemandangan alam dalam hutan bakau, seperti aneka jenis pohon bakau, burung, babairusa, dan kerang. Tak hanya itu, kelompok masyarakat yang terhimpun dalam kelompok Wakatan, menjadi pemandu yang memberikan penjelasan tentang pengetahuan dan kegiatan apa saja yang dimiliki orang Bobongko tentang hutan bakau (Mercusuar, 1998a). Staf YABSHI dan CII berada di balik penyusunan atraksi wisata ini, termasuk dalam melatih kemampuan kelompok Wakatan dalam pemanduan dan manajemen keuangan (Languha, 1998).

Tidak hanya itu, YABSHI dan CII, melalui Sekber Togeana sebagai lembaga pelaksana di lapangan, juga terus mempromosikan kegiatan tersebut kepada wisatawan, pemerintah daerah, agen perjalanan wisata di dalam dan luar negeri, serta di kalangan LSM konservasi. Kedua lembaga ini tak hanya menyebarkan media brosur, membuat press release, memasukkannya dalam website dan buku *the Lonely Planet* (buku panduan paling terkenal bagi

---

<sup>9</sup> Ekowisata adalah bagian dari strategi global yang menggabungkan antara konservasi alam dengan 'pembangunan ekonomi' pada masyarakat di mana konservasi dilakukan atau dikenal dengan Integrated Conservation and Development Program (ICDP). Di kepulauan Togeana Lowe menemukan bahwa gagasan global ICDP menemukan bentuknya yang berbeda karena telah mengalami proses kultural berlapis akibat persinggungan kepentingan-kepentingan para aktor di tingkat lokal, seperti ilmuwan CII dan YABSHI, masyarakat setempat, serta pemerintah (Lowe, 2006: 129-134).



wisatawan di seluruh dunia). Mereka juga menjadikan jembatan bakau di Teluk Kilat sebagai sebuah contoh atau *lesson learned* tentang kesuksesan menggabungkan konservasi dan peningkatan ekonomi penduduk lokal. Suku Bobongko juga diletakkan sebagai aktor utama dalam pengelolaan jembatan, sehingga mereka menjadi '*go internasional*', suatu kondisi yang mereka sadari pula saat itu. Contoh keberhasilan ini pun ditampilkan di berbagai seminar, lokakarya atau pertemuan nasional dan internasional tentang konservasi alam maupun ekowisata. Promosi-promosi inilah yang menyebabkan JET, sebagai organisasi yang menaungi Wakatan, dianugerahkan *British Ariways Tourism for Tommorow Award* untuk kategori *Highly Recommended Ecotourism Destination* di dunia. Ghalib, sebagai koordinato JET pun terbang ke London didampingi staf CII di Jakarta.

Di kepulauan Togean, CII dan YABSHI mengundang Gubernur Sulawesi tengah dan para pejabat pemda untuk datang meresmikan jembatan bakau ini sekaligus mencanangkan program *Let's Go Sulawesi Tengah* (Mercusuar, 1998b). Sebuah acara resmi digelar di tengah hutan bakau Luwok Tingki. Beberapa foto di rumah Ghalib memperlihatkan bagaimana Gubernur dan rombongan bertatap muka, berbincang, dan makan siang bersama dengan orang-orang Bobongko. Terlihat pula bagaimana seorang dari kelompok Wakatan sedang memberi penjelasan tentang kehidupan alam di dalam hutan bakau dalam pengetahuan suku Bobongko.

Ketika gubernur berkunjung atau saat Ghalib menerima anugerah, orang-orang Bobongko di teluk Kilat tengah mempersoalkan batas wilayah desa Lembanato dengan Katupat serta berkonflik dengan perusahaan CC soal *longline* budidaya mutiara. Menurut Ghalib dan beberapa orang Bobongko di Lembanato, kedatangan Gubernur dan penganugerahaan *British Award* merupakan hal yang membuat orang Bobongko merasa memiliki identitas yang jauh lebih baik di banding suku lain.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Menurut Cole (1998), ekowisata yang sering menampilkan pengetahuan masyarakat lokal sebagai sebuah atraksi wisata bisa memperkuat kesadaran dan kebanggaan etnik suatu kelompok sebagaimana terjadi pula pada masyarakat Ngada, NTT. Namun, pada masyarakat di mana struktur sosialnya cenderung hirarkis dan elitis, penguatan tersebut akan menghambat pembagian keuntungan dari pariwisata hanya terpusat pada tokoh-tokoh adat. Dengan demikian, tujuan

Dalam sengketa wilayah dengan desa Katupat, di mana Luok Tingki menjadi wilayah yang dipersengketakan, pemerintah kecamatan tak pernah mengambil keputusan tentang desa mana yang memiliki hak atas wilayah tersebut. Dengan demikian, klaim desa Katupat atas wilayah tersebut masih dianggap sah, setidaknya terlihat dari peta desa di kecamatan dan dalam peta sensus yang dikeluarkan BPS. Beberapa orang di Lembanato bahkan menilai orang kecamatan memang ingin menyingkirkan orang Bobongko karena mereka lebih memihak pada Katupat.

Oleh orang Bobongko seperti Ghalib, pembangunan jembatan bakau di Luok Tingki memiliki makna yang lebih politis. Lokasi jembatan bakau dan aktifitas konservasi yang mereka lakukan dengan CII dan YABSHI di tempat tersebut menjadi alat untuk membuktikan bahwa wilayah tersebut adalah milik Lembanato. Ketika jembatan bakau terbakar, tak lama setelah kunjungan gubernur, orang Lembanato menganggapnya sebagai sikap memusuhi suku Bobongko. Isu bahwa Katupat terancam haknya atas wilayah Luok Tingki pun mengemuka dalam pertemuan beberapa orang di Lembanato. Pesengketaan menjadi semakin kuat ketika sebuah pulau kecil bernama Tambun yang letaknya persis di muka gerbang jembatan bakau, dijual oleh orang Katupat kepada perusahaan CC untuk dijadikan pembenihan kerang mutiara (*hatchery*). Padahal, kelompok Wakatan, CII dan YABSHI telah berencana menjadikan pulau berpasir tersebut sebagai tempat wisatawan menikmati *sunset* setelah mengunjungi jembatan bakau. Orang Katupat tersebut mengaku telah membeli Tambun dari orang Bobongko di Lembanato. Maka, kemarahan orang Bobongko tak hanya kepada orang Katupat, tapi juga kepada orang Bobongko di Lembanato yang menjualnya. “Itu tanah adat, tempat kuburan leluhur orang Bobongko. Tambun itu dari bahasa Bobongko, artinya ‘kuburan’ atau tempat menimbun mayat”, kata salah seorang informan di Lembanato saat rapat membahas soal ini. Dalam hal ini, sejarah dimainkan kembali dalam membangun identitas Bobongko agar memiliki kekuatan untuk memperoleh akses atas teritori tersebut. Lokalitas menjadi bagian yang penting dalam konstruksi orang Bobongko ini (Lovell, 1998).

---

ekowisata itu sendiri untuk membawa kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal perlu dilihat efektifitasnya.

Orang-orang kelompok Wakatan adalah mereka yang berinteraksi dengan staf CII dan YABSHI. Mereka menerima pengetahuan tentang konservasi alam, tentang bagaimana hutan bakau dapat dipahami dari sisi yang berbeda, serta bagaimana memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mendapatkan uang. Namun, bagi orang-orang di Wakatan atau Ghalib, pengetahuan dan praktek konservasi alam yang selama ini mereka lakukan bersama CII dan YABSHI dapat menjadi konteks di mana identitas Bobongko atau orang Lembanato dibangun dalam interaksi mereka dengan suku lain, desa lain, dan dengan pemerintah.

#### **4.2.2. Mengenalkan Orang Bajo yang Berbeda**

Suatu sore, di tengah perjalanan menuju Kabalutan, saya dan beberapa staf CII lainnya singgah di desa Pulau Anam, sebuah desa yang mayoritas dihuni oleh orang-orang Bajo dan memiliki bentuk pemukiman yang agak serupa dengan Kabalutan, rumah-rumah kayu yang padat di atas pulau karang, sebagian rumah ditopang tiang-tiang yang menancap ke dalam laut. Desa ini hanya berjarak sekitar 3 kilometer saja dari Kabalutan. Dari Pulau Anam kami sudah melihat sekumpulan atap-atap rumah penduduk Kabalutan. Perahu kami mengalami kerusakan baling-baling sehingga terpaksa sandar di dermaga Pulau Anam, mencari orang yang mungkin bisa membantu memperbaikinya. Sementara menunggu salah satu di antara kami yang sedang mencari bantuan, saya dan beberapa teman lain dalam rombongan duduk di muka sebuah warung sambil menikmati jajanan yang dijual. Kebetulan, kami membawa beberapa foto-foto berukuran A4 tentang aktivitas pengembangan DPL di Kabalutan, serta selebaran peta ukuran A0 yang telah dilaminating berisi lokasi-lokasi terumbu karang yang menjadi DPL.

Orang-orang di Pulau Anam tak tahu tentang kami, kecuali segelintir orang yang terkadang melihat kami melintas desa mereka dengan perahu. Beberapa orang menyalami saya dan mengenali saya sebagai orang yang pernah mengadakan kegiatan kunjungan ke sekolah dasar di Pulau Anam. Mereka ikut duduk bersama kami dan berbincang. Mereka menanyakan tujuan kami dan apa yang akan dikerjakan. Kami menjelaskan tujuan kami ke Kabalutan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan bersama penduduk di sana untuk

mengembangkan DPL. “DPL itu apa?” tanya salah seorang di antara mereka. Kami pun menjelaskan soal DPL ini dan memberi penekanan tentang praktek pelestarian terumbu karang oleh orang-orang di Kabalutan. “Orang Kabalutan? So dorang itu yang bikin ancur karang. Di belakang sini dorang suka babom babius”, kata salah seorang dari mereka sambil menunjuk ke balik bukit alang-alang yang ada di belakang rumah-rumah penduduk, memberitahu wilayah laut yang biasa menjadi tempat pemboman dan pembiusan ikan. Saya, berinisiatif untuk mengeluarkan beberapa foto yang kami bawa, menunjukkan pada mereka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang Kabalutan bersama CII. Beberapa foto memperlihatkan dengan jelas wajah-wajah penduduk Kabalutan sedang mengikuti rapat, menggambar peta di dinding, atau sedang memasang pelampung stereoform warna oranye. “*Beehh*, Puah X...*Iru* [itu] Mbo Y...*Ooo*, Puah Z”, demikian komentar mereka bergantian sambil menunjuk wajah-wajah orang Kabalutan yang ada dalam foto-foto tersebut. Sebagian tampaknya mengenali nama-nama orang dalam foto. Usai melihat foto dan peta, salah seorang pria yang tampak paling tua dan mengenakan sarung, belakangan saya mengetahui bahwa ia adalah seorang ketua RT, tampak menggelengkan kepala pada saya sambil bersungut-sungut. “*Beeh*, tidak percaya saya...orang Kabalutan?”, komentarnya singkat. Salah seorang teman saya, yang paling intensif berada di Kabalutan untuk membuat DPL ini agaknya terpancing untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan orang-orang di Kabalutan dalam program konservasi terumbu karang ini. Ia bahkan menawarkan desa Pulau Anam untuk ikut melakukan hal yang sama. “Bikin rapat, buat kesepakatan daerah mana saja yang mau dijadikan DPL, Puah”, katanya. Pria tersebut tak membuat keputusan hingga kami bersiap untuk berangkat kembali karena perahu telah diperbaiki. Obrolan kami akhirnya bergeser kepada akibat-akibat yang dirasakan oleh nelayan Pulau Anam akibat aktivitas babom dan babius oleh orang Kabalutan. “Dorang kalau mau babom di tempat dorang, jangan di sini [Pulau Anam]. Kalau di sini tidak ada yang babom babius, kepala desanya keras, kalau ada yang ketahuan, kompresor bisa disita desa”, kata salah seorang penduduk Pulau Anam yang hadir saat itu. Hari semakin sore, dan awan gelap sudah mulai mendekati Kabalutan. Cuaca di kepulauan

Togean memang sering berubah dengan cepat. Kami pun bergegas menuju perahu, berusaha mencapai Kabalutan lebih dulu dibanding awan tersebut.

Penduduk desa Pulau Anam adalah orang-orang Bajo, mereka berbahasa Bajo dalam keseharian mereka, tak ada yang tampak berbeda dari kehidupan mereka dengan orang-orang Kabalutan. Sebagian dari mereka bahkan memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa penduduk di Kabalutan. Rais pernah bercerita pada saya pada suatu malam bahwa ia pernah mencoba mencari dukungan penduduk Pulau Anam untuk sama-sama ‘memerangi’ pemboman dan pembiusan. “Saya sudah bicara sama kepala desa Pulau Anam, dorang mau bikin persatuan orang-orang Bajo di kepulauan Togean, mulai dari Kulinkinari, Siatu, Milok, Pulau Anam, sampai Kabalutan. Kalau perlu kita ajak orang Jaya Bakti. Kitorang mau bicarakan nasib orang-orang Bajo ini, supaya pemerintah lebih perhatikan kita punya kehidupan. Kalo perlu kita bikin semacam pertemuan besar, sekaligus bahas citra orang Bajo yang terlanjut di-cap tukang babom babius”. Saya pun sudah mendengar dari beberapa teman Rais bahwa mereka pernah mendampingi Rais menemui kepala desa Pulau Anam untuk membicarakan soal ini.

#### 4.2.3. Membangun Batas-batas

*The Jakarta Post* memuat sebuah tulisan tentang wawancara seorang ‘mantan jenderal’ dengan tim pembuat film dokumenter dari BBC London:

Known locally as "The General", Pak Usman is Kabalutan's reigning expert in dynamite and cyanide fishing. For three decades he planted explosives beneath the coral, claiming to have dived to depths of 70 meters to maximize the bombs' explosive power.... "I was living exactly the same way as him, fishing with dynamite and cyanide. I am poor and I have a family. If one day I die, I have nothing to leave behind for my family to live on because all the fish have vanished from the nearby waters",... "My children are Bajau, but they haven't experienced the pride of being a Bajau who lives from the ocean. If I kept doing what I was doing, I would have had nothing to bequeath them, not even the pride of being Bajau... "The last couple of years, we have seen some very good results. Now we don't need to paddle all the way out to the ocean to get fish. More fish are seen as more new coral has started to grow," he said proudly.<sup>11</sup>

Usman adalah salah seorang anggota kelompok pengelola DPL yang cukup aktif mengikuti berbagai pertemuan, pelatihan, serta pembuatan DPL di Kabalutan bersama CII. Ia adalah seorang nelayan yang pernah menyandang

<sup>11</sup> Jihan F. Labetubun. “Togean Islanders Band Together to Sustain Marine Life”. *The Jakarta Post*. July 31, 2007.

identitas sebagai ‘tukang babom’. Reputasi Usman sebagai tukang babom, menurut pengakuannya, cukup dikenal oleh orang-orang Kabalutan juga aparat kepolisian di kepulauan Togean. Bersama dengan para ‘jenderal’ lainnya, ia memiliki relasi sosial yang cukup intensif dengan para oknum kepolisian. Ia mengaku mengetahui seluk beluk peredaran pupuk bahan pembuat bom ikan, bagaimana proses melepaskan diri dari jeratan hukum saat ditangkap, serta bagaimana menjaga relasi sosial yang saling menguntungkan dengan para oknum polisi. Bagi Usman, seperti diutarakannya pada BBC London, semua reputasi tersebut adalah masa lalu. Ia kini mencoba membangun identitas baru yang ia harapkan juga diakui oleh orang lain, yaitu sebagai ‘pelindung terumbu karang’.

Predikat sebagai ‘jenderal’ yang telah pensiun tak hanya tampil dalam liputan di *the Jakarta Post* tersebut. Majalah Tropika yang diterbitkan oleh CII juga memuat kisahnya tentang keberhasilan Usman mengubah identitas sebagai tukang babom menjadi seorang pelindung terumbu karang. Dalam pertemuan dengan Bupati, Usman juga diperkenalkan oleh Rais sebagai salah satu contoh bagaimana seorang ‘jenderal’ mampu mengubah dirinya menjadi pelaku pelestarian terumbu karang. Rais juga telah menunjuk Usman untuk menjadi wakil dari kelompok DPL Kabalutan ketika CII mengadakan ‘tour’ ke beberapa desa di kepulauan Togean untuk memperkenalkan program DPL di Teluk Kilat dan Kabalutan. Tour desa ini merupakan bagian dari CII untuk menciptakan lebih banyak DPL di kepulauan Togean. Di tiap desa yang dikunjungi, Usman bersama staf CII Palu dan beberapa anggota kelompok pengelola DPL dari Teluk Kilat melakukan pertemuan dengan warga desa tersebut. Mereka menyampaikan pengalamannya dalam membuat DPL, menceritakan apa saja manfaat yang diperoleh, serta mempersilakan desa yang dikunjungi untuk melakukan hal yang sama.

Dalam kesempatan sosialisasi tentang Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) di Ampana pada awal tahun 2005, Usman menjadi salah satu pembicara yang mewakili kelompok pengelola DPL Kabalutan. Dilengkapi dengan *power point* yang dibuat oleh staf CII Palu, Usman menceritakan kisah hidupnya saat masih menjadi pelaku babom, apa yang ia rasakan ketika itu, hingga akhirnya berhenti dari babom dan menjadi ketua kelompok DPL Kabalutan. Dalam

presentasi dihadapan sekitar 50 peserta dari utusan LSM, Pemda Touna dan Sulteng, pengusaha dan anggota DPRD tersebut Usman kembali menunjukkan dirinya sebagai ‘jenderal’ yang telah berubah menjadi seorang ‘konservasionis’.

Konteks-konteks seperti itu merupakan bagian yang dipakai untuk menentukan posisi (*positioning*), bagian dari proses membentuk batas (*process of boundary making*) yang lebih jelas antara sebagai ‘perusak karang’ dengan ‘pelindung karang’ atau ‘konservasionis’. Saya melihat DPL, yang pada awalnya bertujuan untuk melestarikan terumbu karang dan mengembalikan keberlimpahan ikan, menyediakan garis batas (*boundary*) yang jelas dan berbeda dengan praktek babom dan babius. Di luar kepentingan lainnya, sebagian orang Bajo yang menjadi bagian dari pengembangan DPL ini, setidaknya bagi Rais atau Usman, menganggap batas-batas yang jelas tersebut akan efektif dalam memproduksi identitas orang Bajo yang berbeda dengan identitas yang selama ini dilekatkan orang luar terhadap mereka.

#### **4.2.4. Posisi dan Artikulasi: Negosiasi dengan Tanjung Keramat**

Saya, Rais, dan Wahid (salah seorang pegawai kantor desa Kabalutan), duduk berjajar menghadap sebuah meja kayu yang bagian atasnya dilapisi selembar kaca. Dari balik kaca meja terlihat beberapa brosur tentang terumbu karang dan *scuba diving*, kartu nama dan lembaran-lembaran kertas lainnya yang tersusun. Sebagian tulisan dalam bahasa Inggris, sebagian lagi seperti bahasa Itali. Di seberang meja, Luca, manajer PT. Walea, duduk berhadapan dengan kami. Badannya tegap, dengan kulit yang agak legam terbakar matahari, dan rambut panjang diikat di belakang. Di belakang Luca, Mona (isteri Luca), duduk sambil mengangkat kedua kakinya di atas sebuah rak kayu yang tingginya sekitar 1 meter. Berbeda dengan Rais dan Wahid yang tampak rapi dan terkesan resmi mengenakan kemeja lengan panjang dan sebuah pena terselip disaku mereka, Luca dan Mona hanya mengenakan celana pendek ketat dan T-Shirt tanpa lengan.

Bagi saya, ini kali pertama bertemu dengan Luca, lelaki warga Itali yang menjadi penanggungjawab bisnis PT. Walea di Tanjung Keramat. Tapi, bagi Rais dan Wahid, ini adalah pertemuan kedua, ketiga atau bahkan lebih, dengan Luca. Beberapa hari sebelumnya Luca memang mengundang Rais dan Wahid untuk

bertemu melalui pesan yang disampaikan lewat radio komunikasi. Rais dan Wahid mengaku tak tahu alasan Luca mengundang mereka. Mereka sengaja mengajak saya dengan alasan saya bisa membantu menerjemahkan percakapan mereka, meskipun mereka sempat mengatakan bahwa Luca mahir berbahasa Indonesia dan sedikit memahami bahasa Bajo. Setelah menempuh perjalanan laut dengan perahu katinting selama 4 jam, kami pun bisa berhadapan dengan Luca sore itu di ruang kerjanya. Ini bulan Mei, masa di mana angin Timur biasanya berhembus kencang, sehingga perjalanan kami menjadi lebih lambat 1 jam karena perahu berkapasitas 9 PK ini harus melawan arus dan ombak yang cukup kuat.

“Saya meminta Rais bantu saya. Tolong kamu bertemu kepala desa Jaya Bhakti, minta dia bagaimana caranya menghentikan orang-orang Jaya Bhakti yang datang babom ikan di sini” kata Luca pada Rais. Bahasa Indonesianya cukup baik, bahkan dengan dialek menyerupai gaya bicara orang-orang kepulauan Togeana pada umumnya. Menurut Luca, beberapa hari sebelumnya ia dan beberapa polisi dari kantor Sektor Walea Kepulauan memergoki dan mengejar sebuah perahu yang melakukan pemboman ikan di sekitar Tanjung Keramat. Luca dan polisi meyakini mereka adalah nelayan-nelayan asal Jayabhakti, kecamatan Bunta di Kabupaten Banggai, yang ada di sebelah selatan kepulauan Togeana. Mayoritas penduduk di Jayabhakti adalah orang-orang Bajo. Sebagian penduduk di Kabalutan bahkan memiliki hubungan kekerabatan dengan orang-orang Jayabhakti. Luca merasa bahwa Rais atau orang-orang Kabalutan akan lebih dapat diterima oleh orang Jayabhakti karena mereka sesama suku Bajo. Untuk itu, Luca meminta Rais membujuk orang-orang Jayabhakti, terutama kepala desa di sana, untuk tidak lagi melakukan pemboman ikan di Tanjung Keramat.

“Maaf, Luca. Kalau soal orang babom atau babius itu urusan polisi. Biar saja polisi Walea dengan polisi di Bunta yang urus mereka [pelaku pemboman ikan]. Saya tidak jamin bisa rayu orang Jayabhakti berhenti babom”, jawab Rais. Saya agak terkejut mendengar penjelasan Rais. Belakangan, dalam perjalanan pulang di atas perahu, Rais bercerita pada saya bahwa ia tak mau di-adu domba. Rais khawatir dia hanya akan diperalat Luca, dan nantinya orang Kabalutan justru dimusuhi nelayan dari Bunta. “Ini tidak bagus untuk pariwisata. Turis tidak suka kalau masih ada orang babom. Kami disini sudah menjaga karang. Kalau karang



bagus, ikan-ikan tetap ada buat orang Bajo. Nelayan juga untung”, kata Luca. Alasan Luca seperti ini sudah beberapa kali saya dengar setiap kali konflik antara PT. Walea dan nelayan Kabalutan muncul dan menjadi pembicaraan di kantor pemerintah daerah maupun koran lokal. Alasan seperti ini pula yang pernah saya dengar dari seorang pejabat kabupaten Touna ketika ia menyalahkan orang Bajo yang ia anggap telah mengganggu bisnis Luca dan tidak menghargai ‘usaha baik’ Luca yang telah melakukan konservasi terumbu karang di kepulauan Togeon.

“Luca harus tahu, sekarang ini orang-orang Kabalutan juga sudah menjaga karang. Kitorang so bikin DPL [Daerah Perlindungan Laut] dibantu CII. Torang sama dengan Luca sekarang, sama-sama jaga karang. Bedanya, Luca jaga buat turis, kitorang jaga buat sendiri, supaya bisa cari ikan” kata Rais. Di saat menyinggung soal DPL inilah Rais menunjuk saya dan memperkenalkan saya pada Luca sebagai staf CII yang turut mengembangkan DPL di Kabalutan. Secara singkat saya pun memberi penjelasan tentang tujuan dan bagaimana DPL dilakukan di Kabalutan, termasuk lokasi-lokasi terumbu karang mana saja yang dijadikan area perlindungan. Pada konteks ini, saya pun mendukung pernyataan Rais bahwa orang-orang Kabalutan telah melakukan seperti apa yang selalu diucapkan oleh Luca, yaitu konservasi terumbu karang. “Makanya, Luca jangan lagi anggap orang Kabalutan ‘tukang’ rusak karang. Memang sampai sekarang masih ada yang babom. Tapi, mudah-mudahan dorang nanti berhenti juga. Kalau karang dekat kampung so bagus ulang, kitorang tak perlu lagi jauh-jauh bacari ikan kemari [Tanjung Keramat]”, kata Rais.

Saya merasa ada perubahan sikap Luca setelah Rais menyinggung soal DPL ini. Sejak awal pembicaraan dilakukan, Luca memang langsung mempersoalkan keterlibatan nelayan Bajo dengan praktek pemboman ikan atau perusakan karang di Tanjung Keramat. Tema ini agaknya menjadi sangat sensitif bagi Rais sejauh berada dalam konteks konflik antara nelayan Kabalutan dengan PT. Walea. Namun, usai Rais menyetarakan perlindungan karang antara Luca dengan orang Kabalutan, sikap Luca agak lebih terbuka. Suasana perbincangan kami terasa lebih nyaman meski masih ada perdebatan antara Luca, Mona dan Rais soal keterlibatan nelayan Bajo dari Kabalutan dan Bunta dalam pemboman dan pembiusan ikan.

“Bagaimana kalau saya tawarkan kerjasama. Kamu di Kabalutan jaga karang, tapi Rais harus bantu supaya orang Kabalutan tidak lagi babom di Tanjung Keramat. Saya kebetulan akan ke Itali, nanti saya coba bicara dengan kantor di Italia, barangkali kami bisa bawa turis ke sana [Kabalutan] untuk menyelam atau lihat-lihat kampung. Tapi tidak janji. Saya akan hubungi Rais, nanti kita bertemu lagi, saya mungkin bisa datang ke Kabalutan setelah dari Italia”, kata Luca. Ucapan Luca ini tak pernah saya perkirakan. Orang yang selama ini begitu dikenal di kepulauan Togean, bahkan hingga ke Palu, sebagai ‘musuh’ orang Kabalutan, kini menawarkan sebuah kerjasama. Usai pertemuan Rais sempat berkata pada saya bahwa sikap Luca tersebut mungkin karena dia melihat orang Kabalutan mulai berubah. Dalam perjalanan pulang Rais bersemangat mengatakan pada saya bahwa sikap Luca yang cenderung ‘lunak’ seperti itu disebabkan mereka telah membangun DPL di Kabalutan. Rais sangat yakin bahwa DPL telah mengubah pandangan orang luar yang selama ini menganggap suku Bajo sebagai perusak terumbu karang.

Sekitar satu bulan sejak pertemuan di Tanjung Keramat, Rais memberi tahu saya bahwa Luca telah berkunjung ke desa Kabalutan. Sayangnya Rais sedang berada di tempat lain ketika itu. Menurut Rais, inilah kali pertama seorang ‘Luca’ yang selalu berseteru dengan orang Bajo menginjakkan kakinya di Kabalutan. Luca tak hanya menawarkan kerjasama pariwisata, ia juga kemudian bersedia membangun sebuah pasar untuk desa Kabalutan. Sebuah bukit dari batu karang akhirnya diruntuhkan dengan kerja bakti untuk menyiapkan lahan membangun pasar tersebut. Meski tidak memiliki dinding, pasar yang dibangun oleh Luca dan masyarakat Kabalutan ini cukup luas dan dibuat dengan lantai semen. Setiap hari Selasa, para pedagang yang sebelumnya berjualan di sisi jalan desa yang sempit, kini terkumpul di pasar yang baru tersebut. Bagi sebagian penduduk, pasar ini membuat desa Kabalutan lebih rapi dan tertib pada hari Selasa. Bagi pemerintah desa, pasar baru akan menarik semakin banyak pedagang untuk datang ke Kabalutan. Itu berarti pula desa akan memperoleh pungutan pasar yang jauh lebih besar. Rais mengatakan bahwa konflik nelayan Kabalutan dengan Luca sudah tak pernah terjadi sejak DPL dibangun. Ia menduga, nelayan sudah

tak perlu lagi mengail lolos hingga jauh, cukup di sekitar desa karena terumbu karang sudah mulai baik kondisinya sehingga ikan lebih banyak.

Tak hanya perubahan sikap Luca. Pengembangan DPL juga telah mengundang perhatian beberapa pejabat di Kabupaten Touna. Promosi tentang kegiatan ini kepada pemerintah di Ampana memang dilakukan oleh CII dan Rais sebagai bagian dari program pengembangan DPL. “Selama ini, mana ada Bupati datang ke Kabalutan, apalagi kasih bantuan”, kata Rais setelah kunjungan bupati dan beberapa kepala dinas ke Kabalutan untuk melihat DPL tersebut. Saat itu Bupati juga memberikan bantuan jaring bagi nelayan Kabalutan untuk membuat keramba di bawah rumah mereka. Menurut Bupati, dengan memelihara keramba, nelayan akan lebih banyak berada di desa dan tidak lagi melakukan pemboman dan pembiusan. Puah Sofyan, yang juga menjadi anggota kelompok DPL sempat dipuji oleh bupati karena keputusannya untuk berhenti dari kegiatan babom. Kepala Dinas Perikanan, Ketua Bappeda, dan Kepala Dinas Pariwisata adalah orang-orang yang mengaku menghargai kegiatan DPL di Kabalutan. Dari kunjungan dan bantuan orang-orang pemerintah inilah sebagian anggota kelompok pengelolaan DPL merasa pemerintah jauh lebih memperhatikan mereka.

Kelompok yang tergabung dalam DPL juga dibawa oleh CII berkeliling ke beberapa desa untuk menceritakan pengalaman mereka membangun DPL ini. Beberapa desa sempat memohon bantuan CII untuk membangun DPL di desa mereka. Namun, CII belum menanggapinya, melainkan hanya menyatakan bahwa desa lain bisa datang langsung ke Kabalutan atau Teluk Kilat untuk belajar cara membuat DPL ini.

Orang-orang Bajo di Kabalutan selama ini menganggap Luca, Pemerintah, dan penduduk desa lain adalah aktor-aktor yang memiliki persepsi bahwa mereka adalah perusak terumbu karang. Beberapa nelayan yang mengikuti pengembangan DPL mengaku bahwa aktor-aktor tersebut telah menunjukkan sikap yang berbeda terhadap mereka. Rais dan Puah Sofyan adalah orang-orang yang selalu menunjukkan pada orang luar bahwa Kabalutan ‘berubah’, menjadi sebuah desa yang pertama kali melakukan kegiatan konservasi terumbu karang di kepulauan Togean, bukan desa atau suku lain. Ketika saya bertemu dengan beberapa orang penduduk Kabalutan di Ampana, mereka meminta CII untuk membuat satu lagi

lokasi zona inti selain Toroh Sidarawi. “Kita minta bikin satu lagi macam Sidarawi, ada karang yang bagus di Sappa Siring, mudah-mudahan CII bisa bantu lagi”, kata mereka. Tetapi, CII Palu tidak bisa memenuhi keinginan mereka karena lokasinya terlalu jauh dari desa, dan harus dilakukan penelitian kembali yang membutuhkan dana, sesuatu yang sulit dilakukan.

Akankah konservasi di kepulauan Togean akan selalu dianggap efektif membangun identitas seperti diharapkan Usman? Tergantung pada sejauh mana masyarakat memahami ideologi dan praktek konservasi sebagai sesuatu yang menguntungkan atau merugikan bagi mereka. Semua juga tergantung siapa aktor yang kekuasaannya paling berperan membentuk pemahaman tentang konservasi nantinya. Ketika kepulauan Togean menjadi Taman Nasional, atau sering disingkat sebagai TNKT, orang-orang Bajo mulai ditempatkan pada posisi yang berbeda oleh orang di luar mereka. Kontroversi tentang TNKT telah membentuk batas-batas antara ‘pendukung’ dan ‘penolak’ TNKT. Beberapa wacana kemudian berkembang bahwa orang-orang Bajo di Kabalutan, juga Bobongko di Teluk Kilat adalah para ‘pendukung’ TNKT. Pengetahuan tentang taman nasional yang akan membawa kesengsaraan bagi masyarakat Togean, mengecilkan akses orang Bajo terhadap sumberdaya alam di laut, serta menimbulkan konflik fisik, telah disampaikan oleh beberapa orang yang mengaku dirinya berada pada posisi ‘menolak’ TNKT. Konservasi pada konteks pro-kontra taman nasional ini telah mengandung makna yang ‘mengerikan’ dan ‘menyengsarakan’ bagi masyarakat. Akan tetapi, konservasi dalam konteks DPL, setidaknya bagi sekelompok orang Bajo di Kabalutan, memiliki makna yang berbeda, yaitu mengembalikan keberlimpahan ikan sekaligus mengubah ‘nama baik’ suku Bajo. Ketika konservasi dikaitkan dengan taman nasional, orang-orang Bajo yang selama ini terlibat dalam pengembangan DPL ikut menyadari bahwa mereka telah dianggap sebagai ‘pendukung’ taman nasional.

Oleh karenanya, pada bagian berikutnya saya mencoba memperlihatkan informasi-informasi yang saya peroleh terkait dengan lahirnya TNKT serta rona politik atau relasi kekuasaan dan kepentingan para aktor dalam proses perubahan status kepulauan Togean sebagai sebuah kawasan konservasi alam bernama taman nasional. Deskripsi tentang TNKT ini, sejauh yang saya pahami, pada akhirnya

juga memiliki kaitan dengan identitas orang Bajo Kabalutan yang selama ini menggunakan DPL sebagai bentuk konservasi alam dan melakukan konstruksi identitas untuk membersihkan nama suku Bajo dari label ‘perusak karang’.



## BAB 5

### Taman Nasional: Konservasi dengan Wajah Berbeda

Sebuah tabloid di kota Palu menurunkan sebuah berita:

#### **Masyarakat Adat Lindu Mengadu ke Komda HAM Palu**

Sekitar delapan orang perwakilan masyarakat Adat Lindu, mengadu ke kantor Komisi Daerah Hak Asasi Manusia (Komda HAM) Sulawesi Tengah, Rabu (5/11) siang kemarin. Mereka mempersoalkan tindakan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) yang secara terus menerus melakukan kriminalisasi terhadap warga Desa Tomado kecamatan Lindu. Menurut salah satu perwakilan warga, Rony Toningki, kedatangan mereka di Komda HAM siang itu adalah untuk mempersoalkan tindakan BBTNLL yang melakukan pemanggilan lagi terhadap dua warga Lindu.... (*Media Al-Khairat*, edisi Kamis, 6 November 2008).

Taman Nasional Lore Lindu berjarak hampir 500 kilometer dari kepulauan Togean. Berbeda dengan kepulauan Togean, tak ada laut di Lore Lindu. Tapi, kedua tempat ini memiliki kesamaan, yaitu sebagai kawasan konservasi dengan fungsi taman nasional yang lahir melalui sebuah surat keputusan Menteri Kehutanan RI. Apa yang selama ini terjadi di TNLL, akan ikut membentuk pemahaman orang tentang Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT).

Hutan, laut, flora dan fauna di kepulauan Togean secara fisik mungkin tak banyak berubah. Mereka tetap ada di sana, hidup mengikuti prinsip-prinsip rantai makanan dalam sebuah ekosistem sebagaimana dijelaskan oleh para ahli biologi. Nelayan, petani, para nahkoda kapal, wisatawan, serta pengelola akomodasi pariwisata juga masih berinteraksi dengan alam Togean lewat cara-cara yang tak jauh berbeda dengan sebelumnya. Namun, di mata pemerintah dan LSM, setidaknya berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan, kepulauan Togean telah berubah sejak ditetapkan sebagai taman nasional.

#### **5.1. Berebut Tomini, Menyelamatkan Togean**

Sekitar pukul 15.00 sore hari, tanggal 20 September 2004, Markus, staf CII kantor Palu mendatangi saya pada sebuah ruangan di sebelah kamar kerjanya. Ia mengabarkan bahwa kepulauan Togean baru saja ditunjuk sebagai taman nasional, sambil memperlihatkan beberapa imel yang dikirim staf-staf CII lain yang ada di Jakarta, Sorong, Medan, dan Padang. Isi email tersebut serupa, yaitu ucapan selamat atas kerja keras seluruh staf CI Palu dalam membantu keluarnya

keputusan Menteri Kehutanan soal penunjukan kepulauan Togean sebagai taman nasional satu hari sebelumnya. Markus juga menunjukkan email yang berisi ucapan serupa dari Vice President CI untuk kawasan Asia Pasific yang berkedudukan di Washington DC.

Kata-kata dalam email yang diterima Markus mengandung makna penghargaan dan dorongan bagi dirinya dan teman-temannya sesama staf CI Palu untuk menjalankan program konservasi yang menjadi tugas mereka dengan lebih baik. Bagi para staf CI Palu, di satu sisi lahirnya Taman Nasional kepulauan Togean (TNKT) merupakan bukti bahwa mereka mampu menjalankan tugas mereka kepada CII Jakarta dan Washington DC. TNKT merupakan alat bagi mereka untuk mengurangi pandangan CII Jakarta dan CI Washington DC yang selama ini menganggap program CI di kepulauan Togean sebagai program yang kecil dan tak memiliki prospek pengembangan karena selalu mengalami kesulitan untuk menarik minat para donor. Dua alasan inilah yang selalu digunakan oleh sebagian para manajer tingkat atas di CI Jakarta dan Washington DC untuk menutup program konservasi di kepulauan Togean.

Di sisi lain, saya, Markus dan teman-teman di kantor CII Palu menanggapi dengan penuh kekhawatiran tentang hambatan-hambatan yang akan dihadapi setelah lahirnya TNKT ini. Sejak diminta oleh pemerintah daerah Sulawesi Tengah untuk membantu proses perubahan status kepulauan Togean sebagai kawasan konservasi, kekhawatiran di antara staf CII Palu sebetulnya sudah muncul. Oleh karenanya, mereka menanggapi dengan penuh hati-hati. Mereka sadar bahwa keinginan gubernur Sulawesi Tengah untuk menjadikan kepulauan Togean sebagai kawasan konservasi banyak dipengaruhi oleh situasi politik saat itu ketimbang faktor-faktor kondisi keanekaragaman hayati, yaitu relasi kekuasaan antara gubernur Sulawesi Tengah dengan Gubernur Gorontalo dalam rencana pembentukan Badan Otorita pengelolaan Teluk Tomini, atau disering disingkat dengan BOTT.

Situasi tersebut memang menjadi salah satu pendorong lahirnya TNKT. Perbincangan saya dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Asisten Gubernur, serta kepala Dinas Kehutana Propinsi semakin menunjukkan adanya pengaruh rivalitas antara Gorontalo dan Sulawesi Tengah terhadap usulan Gubernur Sulteng agar

kepulauan Togean menjadi kawasan konservasi. Apalagi, di tengah adanya kekhawatiran dari pejabat pemerintah propinsi Sulteng bahwa Gorontalo akan mengambil kepulauan Togean sebagai wilayah mereka. Belum lagi berhembus isu bahwa Gorontalo memiliki peta versi mereka yang menyebutkan bahwa teluk Tomini dahulunya bernama 'Teluk Gorontalo'.

### 5.1.1. Badan Otorita Pengelolaan Teluk Tomini

Badan Otorita Teluk Tomini (BOTT) telah menjadi tema liputan media massa lokal di Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2003 hingga 2005. BOTT sesungguhnya dipicu oleh proposal yang diajukan oleh gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, kepada pemerintah Pusat tentang pengembangan Etalase Perikanan di Wilayah Indonesia Timur. Mega proyek ini telah mendapat kritik dari beberapa LSM di Gorontalo yang mengkhawatirkan adanya kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya perikanan di wilayah Teluk Tomini yang pada akhirnya menyingkirkan akses penduduk setempat terhadap sumberdaya alam. Pada tahun 2002, Rahman Dako dari Yayasan Kelola yang bkedudukan di Gorontalo menyebarkan sebuah artikel berisi informasi tentang tujuan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan pemerintah propinsi Gorontalo dalam proyek Etalase Perikanan<sup>1</sup>.

Dalam artikel tersebut Dako mencantumkan latar belakang lahirnya proyek etalase Perikanan sebagai berikut:

Proyek ini diawali dengan pertemuan antara Gubernur Gorontalo Fadel Mohamad dengan Menteri Kelautan Rohmin Dahuri di Jakarta, beberapa waktu setelah Fadel dilantik menjadi Gubernur (sebelumnya pelantikan Fadel sempat terganjal karena kasus piutang dengan Bank IFI). Fadel memperkenalkan Gorontalo dan menyampaikan 3 program utamanya di Gorontalo yaitu: Agropolitan, Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Pengembangan SDM. Rohmin Dahuri merespon dengan baik kedatangan Fadel Mohammad dan kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Studi Awal oleh Tim dari PKSPL IPB pada bulan Januari lalu. Tim PKSPL IPB ini terdiri dari beberapa orang Gorontalo dan ada yang bernama Nana Muliana. Tim ini yang lalu merekomendasikan adanya mega proyek Etalase Perikanan ini. Pada tanggal 15 Pebruari 2002, bertepatan dengan hari Ulang Tahun I Provinsi Gorontalo yang lalu, Rohmin datang ke Gorontalo dan memberikan ceramah ilmiah di hadapan anggota DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus menyaksikan penandatanganan MoU antara IPB dengan Universitas Gorontalo (Universitas Gorontalo adalah universitas swasta dimana Ketua DPD Golkar Provinsi Gorontalo Ahmad Pakaya sebagai Ketua Yayasannya). DPRD langsung menerima proyek ini. Besoknya pada tanggal 16 Pebruari Rohmin mencanangkan mega proyek ini di Tabulo Kecamatan Paguat dan mengadakan dialog dengan masyarakat Desa Bajo Kecamatan Tilamuta. Rohmin sempat dihadang oleh demonstrasi masyarakat dari desa Dulupi yang meminta supaya dia juga datang di Desa Dulupi.

<sup>1</sup> Rahman Dako, *Sekilas tentang Mega Proyek Etalase Kelautan Indonesia Timur di Gorontalo*. Unpublished. 2002.



Beberapa orang yang saya kenal sebagai anggota LSM di Sulawesi Tengah pun ternyata memperoleh informasi serupa, dan sebagian dari mereka melontarkan kritik melalui media massa soal proyek Etalase Perikanan tersebut. Salah satunya sebagaimana utarakan Sudirman Zuhdi dari Yayasan Madani Indonesia dan Rijal dari Yayasan Todea, yang dimuat majalah Tempo edisi bahasa Inggris<sup>2</sup>:

Several environmental organizations in Sulawesi have urged Gorontalo governor Fadel Muhammad to prioritize the preservation of Togeian islands' marine ecosystem in carrying out the Tomini mega-project. "We ask the governor not to exploit Tomini Bay for his project," said Sudirman Suhdi, the director of Civil Society non-governmental organization (NGO), in Palu on Friday (19/4). According to Suhdi, the governor's measure to develop the marine sector for business should be welcomed by everyone. However, problems could occur as a result of the Tomini project if the governor fails to pay attention on the ecosystem of Togeian islands. "We're prepared to face the governor if the islands are destroyed by the project," Suhdi said. Rijal, member of Palu Todea NGO, also made a similar comment on this matter. According to him, the biodiversity in the Togeian islands should be preserved. Rijal is worried that the Rp 1-trillion Tomini project could destroy the ecosystem of the Togeian islands and warned the governor to be very careful in developing the Tomini Bay.

Mengapa proyek Etalase Perikanan yang diusulkan Gorontalo dikaitkan dengan keanekaragaman hayati di kepulauan Togeian yang sebetulnya berada dalam wilayah administratif Sulawesi Tengah? Hal ini tak lepas dari dugaan LSM-LSM di Palu tentang kemungkinan proyek Etalase ini untuk berkembang tak hanya pada wilayah perairan Gorontalo, namun meluas hingga meliputi seluruh wilayah perairan Teluk Tomini yang akan melibatkan propinsi Sulawesi Tengah, bahkan Sulawesi Utara.

Konsep tentang BOTT sendiri belum terdengar liputannya di media massa lokal hingga tahun 2002. BOTT mulai menjadi perbincangan sekitar awal 2003, ketika Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara melakukan pertemuan yang melibatkan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Dalam beberapa diskusi dengan sekelompok orang dari berbagai LSM di Palu, saya memperoleh informasi bahwa Gorontalo memiliki wilayah perairan yang sangat terbatas, yaitu hanya mencapai 12 mil dari garis pantai mereka.<sup>3</sup> Etalase Perikanan merupakan

<sup>2</sup> "Gorontalo Governor Urged to Preserve Ecosystem of Togeian Islands". *Tempo* magazine, April 19, 2002.

<sup>3</sup> Saya terlibat dalam sebuah forum komunikasi antar-LSM di Palu yang memiliki minat terhadap isu-isu pesisir dan laut. Forum ini beberapa kali melakukan diskusi, salah satunya tentang proyek etalase perikanan ini. Pendapat mereka soal kewenangan Gorontalo atas wilayah laut mengacu pada pasal 3 dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal ini mengatur wilayah administratif pemerintah Propinsi di perairan adalah 12 mil dari garis pantai yang dihitung

proyek yang spesifik berada dibawah pengelolaan Propinsi Gorontalo. Beberapa LSM di Palu menduga BOTT akan memberi akses yang lebih luas bagi Gorontalo terhadap sumberdaya alam di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Konsep BOTT mensyaratkan adanya kerjasama dari ketiga propinsi tersebut untuk secara bersama-sama memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di wilayah Teluk Tomini, mulai dari perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Beberapa LSM di Palu tetap menganggap BOTT sebagai strategi Fadel Muhammad atau Gorontalo untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya Teluk Tomini.

Persoalan lain kemudian muncul manakala BOTT membutuhkan satu sekretariat yang lokasinya akan dipilih di salah satu propinsi tersebut. Gorontalo merasa sebagai propinsi yang paling siap untuk menjadi pusat sekretariat BOTT. Pandangan mereka tentang ini mendapatkan reaksi dari propinsi Sulawesi Tengah yang merasa bahwa wilayah administratif mereka di Teluk Tomini jauh lebih besar daripada Gorontalo. Alasan inilah yang menyebabkan beberapa pejabat pemda Sulawesi Tengah berpendapat bahwa Sulteng jauh lebih layak menjadi pusat sekretariat BOTT.

Namun, perebutan sekretariat tersebut ternyata berpengaruh hingga ke kepulauan Togean. Apalagi berhembus pula isu bahwa Gorontalo akan mengambil kepulauan Togean sebagai wilayah mereka. Seorang informan di kantor Gubernur bercerita bahwa Gorontalo memiliki peta yang menyatakan teluk Tomini adalah Teluk Gorontalo sesuai sejarah pada jaman Belanda. Isu pencaplokan oleh Gorontalo semakin meyakinkan ketika Fadel Muhammad dikabarkan sering mengunjungi kepulauan Togean, tidak hanya untuk diving tapi juga bertemu dengan masyarakat di sana. Saya menyebut kondisi seperti ini sebagai rivalitas elit yang meresap ke tingkat publik. Konteks rivalitas itu sendiri tak lepas dari persoalan perebutan sekretariat BOTT antara propinsi Sulteng dengan Gorontalo. Beberapa 'pengamat' lokal di Togean, kota Ampana, atau Palu, cukup sering menyampaikan analisisnya tentang rivalitas Ponulele dan Fadel ini. Mereka kadang menempatkan kualitas Ponulele di bawah Fadel.

---

dari pulau terluar. Kasus perebutan sumberdaya alam perairan bermunculan pada beberapa daerah di Indonesia setelah UU ini diterapkan. UU No. 22 ini kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2002 di mana pasal 3 di atas mengalami perubahan, meski substansi aturannya tetap menyebutkan secara eksplisit kewenangan propinsi terhadap wilayah perairan.

Ketika saya menuju desa Kabalutan, Rahmat, seorang guru yang bersama saya menumpang dalam satu perahu, berpendapat bahwa jika seluruh penduduk kepulauan Togean diminta sikapnya tentang BOTT, ia memastikan bahwa sebagian besar akan memilih mendukung Fadel dan BOTT. Alasan Rahmat, penduduk kepulauan Togean yang memiliki garis keturunan Gorontalo jumlahnya cukup banyak, terutama di kecamatan Walea Kepulauan dan kecamatan Walea Besar di bagian timur kepulauan Togean. Saya mencoba memahami pendapat Rahmat sebagai cara memandang rivalitas Sulteng dan Gorontalo soal BOTT ini dalam pembentukan identitas sosial penduduk kepulauan Togean keturunan Gorontalo.

Analisis yang dilakukan Rahmat seakan memiliki relevansi ketika muncul sebuah kelompok bernama KIPIG atau Komite Independen Pro Integrasi Gorontalo. KIPIG merupakan kelompok yang dideklarasikan oleh beberapa orang penduduk di Walea Kepulauan yang merasa memiliki garis keturunan Gorontalo. Yasin, salah seorang pendiri Forum Pemuda dan Pelajar Togean (FPPT) yang dibentuk oleh beberapa anak muda asal kepulauan Togean yang tinggal di kota Palu, menganggap KIPIG sebagai sebuah gerakan mendukung pelaksanaan BOTT. Bagi Yasin, KIPIG berisi 'orang-orang' Fadel yang mencoba menekan pemerintah Sulteng untuk menerima konsep BOTT yang diusulkan Fadel. Pada saya, Yasin mengaku sangat menentang kehadiran KIPIG, apalagi mereka mengancam memisahkan diri dari Sulteng untuk bergabung dengan Gorontalo. Informasi yang saya peroleh, saya mengenal beberapa orang pembentuk KIPIG ini, jauh sebelum KIPIG lahir, sekelompok penduduk di Walea Kepulauan pernah menyatakan keinginan bergabung dengan Gorontalo dan Kabupaten Banggai karena merasa dianaktirikan dalam pembangunan di Sulteng (*Mercusuar*, 2001). Mereka menganggap wilayah ini paling terbelakang dari segi infrastruktur dan kurang mendapat proyek-proyek pembangunan dari kabupaten maupun propinsi. Secara geografis, kecamatan Walea Kepulauan dan Walea Besar memang paling jauh dari pusat pemerintahan di Ampana apalagi Palu, dibanding kecamatan lain di Togean. Keinginan 'merdeka' ini ternyata muncul kembali di tengah rivalitas Sulteng dan Gorontalo soal pelaksanaan BOTT.

Tanggal 6 September 2003, dalam sebuah seminar sehari tentang BOTT di Hotel Palu Golden, atau sekitar satu bulan sebelum kedatangan Megawati ke Togean, utusan KIPIG menyatakan dengan tegas dukungannya terhadap Gorontalo dan BOTT di kepulauan Togean. Pernyataan ini disampaikan langsung di hadapan Fadel Muhammad dan pembicara lain yang kebetulan menjadi narasumber seminar. Dalam sesi tersebut, Yasin juga mengacungkan tangan dan menyampaikan penolakan atas BOTT di kepulauan Togean. Ia khawatir BOTT hanya akan menguntungkan pengusaha luar yang mengambil sumberdaya alam Togean sehingga kerusakan alam hanya akan ditanggung penduduk lokal. Dalam seminar tersebut, baik Yasin maupun KIPIG sama-sama menyatakan bahwa mereka adalah perwakilan masyarakat lokal di kepulauan Togean. Sikap Yasin dan FPPT yang menolak BOTT dan mengaitkannya dengan isu pelestarian alam Togean juga dikutip oleh Radar Sulteng sehari setelah seminar tersebut.<sup>4</sup>

Beberapa hari sebelum seminar, surat kabar *Radar Sulteng* telah memuat sebuah artikel yang ditulis Yasin atas nama FPPT tentang penolakan terhadap BOTT dan kemungkinan dampaknya terhadap masyarakat dan sumberdaya alam kepulauan Togean. Yasin menulis artikel tersebut di kantor CII Palu. Ia juga mengutip data-data tentang keanekaragaman flora fauna kepulauan Togean yang ada di kantor CII Palu untuk menunjukkan pentingnya melestarikan alam kepulauan Togean. Yasin memang memiliki akses terhadap informasi soal keanekaragaman hayati yang dimiliki kantor CII Palu karena ia sering berada di sana dan berteman dekat dengan staf CII Palu. Bahkan, Yasin dan beberapa mahasiswa asal Togean beberapa kali meminjam salah satu ruangan kantor CII Palu untuk melakukan rapat-rapat menjelang pembentukan FPPT.

### 5.1.2. Kontestasi yang mengubah kepulauan Togean

---

<sup>4</sup> Disebutkan dalam surat kabar tersebut: ...*Forum Pemuda dan Pelajar Togean menyatakan menolak kebijakan [BOTT] tersebut, sebab yang mesti dilakukan sekarang adalah membenahi kerusakan hutan dan laut di wilayah itu [Teluk Tomini dan Kepulauan Togean]. "Pemprov Sulteng Boikot Seminar Otorita Teluk Tomini?"* dalam *Radar Sulteng*. Selasa, 7 Oktober 2003.

Sabtu, 12 Oktober 2003, sekitar pukul 10.00, bersama empat orang teman dari Palu, saya duduk di serambi rumah kayu milik seorang warga Wakai, desa yang juga ibukota kecamatan Una Una, kepulauan Togean. Saya, dan beberapa orang yang ikut berbincang bersama kami, mengenakan kemeja batik. Tidak seperti biasanya, kota kecamatan yang kecil ini, hari itu ramai didatangi banyak orang luar Togean, setidaknya menurut pengamatan saya yang telah empat tahun berada di kepulauan Togean. Mereka berdatangan karena satu hal yang sama dengan saya, yaitu kedatangan presiden Megawati Soekarnoputri ke kepulauan Togean. Direncanakan presiden akan mendarat di sebuah lapangan di Wakai sebentar lagi dengan menggunakan helikopter Puma yang menerbangkannya langsung dari bandara Gorontalo.

Dari serambi rumah tempat saya duduk, yang kebetulan persis di sisi jalan menuju lapangan tersebut, saya dapat mengamati secara jelas orang-orang hilir mudik dari dan menuju lapangan, termasuk beberapa petugas keamanan berseragam polisi maupun tentara lengkap dengan senjata. Suasana cukup bising oleh suara orang berbicara dan sepeda motor yang melintasi jalanan. Tak berapa lama, saya dan beberapa orang lainnya, melihat beberapa sepeda motor melintas ke arah lapangan di mana sudah banyak orang berkumpul di bawah tenda besar sejak pagi tadi. Para pengendara motor ini adalah tukang ojek yang khusus disewa untuk mengangkut rombongan pemerintah dari kabupaten Touna dan propinsi Sulawesi Tengah. Saya melihat salah satu motor membonceng Damsyik Ladjalani, pejabat sementara bupati Touna yang lahir di Bomba, sebuah desa yang letaknya sekitar 10 kilometer sebelah barat Wakai. Satu motor lainnya tampak membonceng Aminuddin Ponulele, gubernur Sulteng. Saya menduga Megawati akan segera tiba di Wakai.

Seorang pria, pemilik rumah tempat saya duduk, yang sedari tadi menjadi teman berbincang lantas berkomentar soal Fadel Muhammad dan Aminuddin Ponulele. “Sejak jadi gubernur, torang di pulo [sebutan penduduk untuk kepulauan Togean] ini, baru kali ini dapa liat muka kita pe gubernur. Padahal, kalo Fadel [gubernur Gorontalo] so berapa kali kemari [Wakai]”. Aminuddin Ponulele dilantik menjadi gubernur Sulteng pada tahun 2000, setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPW Partai Golkar Sulawesi Tengah. Seingat saya, yang

sejak 1999 bekerja di kepulauan Togean, ia memang belum pernah menginjakkan kakinya ke kepulauan Togean. Dengan akses masyarakat kepulauan Togean terhadap media massa yang sangat rendah, karena tak ada surat kabar dan TVRI Sulteng tak tertangkap di televisi mereka, tak mengherankan jika kebanyakan orang di kepulauan Togean mengaku tak tahu wajah gubernur mereka. Beberapa penduduk yang sempat saya temui ada yang menganggap Ponulele kalah populer dibanding gubernur Gorontalo. Fadel, sebelum menjadi gubernur Gorontalo memang telah lebih dulu dikenal sebagai pengusaha dan pengurus partai Golkar tingkat nasional.

Jauh sebelum saya menunggu kedatangan presiden Megawati ini, ketika saya berada di beberapa desa di kepulauan Togean, cerita tentang kedatangan Fadel Muhammad di kepulauan Togean sering saya dengar saat berbincang dengan penduduk. Sebagian mengaku melihatnya langsung, sebagian lagi memperoleh cerita dari orang lain. Seorang teman saya yang juga penyelam bercerita bahwa Fadel adalah sahabat dekat pemilik Black Marlin Dive Resort, salah satu *dive operator* di pulau Kadidiri, sebelah utara Wakai. Ia menyebutkan bahwa Fadel sudah beberapa kali datang ke Kadidiri untuk berolahraga *scuba diving*. Ia menyebut hobi menyelam sebagai salah satu keunggulan Fadel dibanding Aminuddin Ponulele. Kadang, sebelum kembali ke Gorontalo, ia singgah di Wakai. Ketika ia berkunjung ke Wakai inilah penduduk Wakai, termasuk Camat Una Una, ikut menemuinya dan berbincang dengan Fadel.

Camat bahkan menceritakan kisah pertemuannya dengan Fadel pada saya. Menurutny, Fadel pernah berseloroh dengannya soal bertukar jabatan. “Fadel bilang, dengan kondisi alam Togean yang indah, dia mau jadi Camat Una Una, sedangkan saya disuruh menjadi gubernur Gorontalo. Ini karena Fadel kagum dengan alam Togean”. Pemilik rumah tempat saya menunggu kedatangan Megawati juga menirukan ucapan Fadel: “Waktu Fadel ke Wakai, dia sempat bicara pada penduduk. Kalian ini butuh apa? Mau generator [listrik], saya bantu. Kalo saya jadi gubernur Sulteng, sudah saya bantu”.

Ketika presiden Megawati pergi meninggalkan kepulauan Togean setelah bertemu dengan Fadel dan Ponulele di atas kapal perang RI Tanjung Dale, saya sempat melihat Gubernur Sulteng kembali melintas di muka tempat saya duduk.

Ia terlihat membonceng ojek dengan wajah agak murung. Seorang dari kecamatan bercerita bahwa Gubernur Sulteng kecewa dengan pertemuan tersebut. Diceritakan pula bahwa jumlah utusan dari Gorontalo yang diijinkan naik ke kapal perang bertemu Megawati jauh lebih banyak di banding dari Sulawesi Tengah, padahal kepulauan Togeana secara administratif ada di Sulteng. Ini membuat Ponulele jengkel menurut analisis informan tersebut.

Terlepas apakah analisis informan tadi benar atau tidak, dan apakah Ponulele terpengaruh oleh hasil pertemuan dengan Gorontalo tadi, yang pasti pada tanggal 21 Pebruari 2004, dua bulan setelah kunjungan Megawati, Gubernur Sulawesi Tengah mengirimkan surat usulan perubahan kepulauan Togeana menjadi Taman Wisata Alam seluas 411.373 hektar. Surat seperti ini bukanlah hal baru, karena pada tahun 1989 Gubernur Sulteng juga pernah mengusulkan hal yang sama namun hanya seluas 100.000 hektar. Ini berarti Ponulele telah memasukkan seluruh pulau di kepulauan Togeana sebagai kawasan konservasi dengan status Taman Wisata Alam. Surat Gubernur ini disusul pula dengan surat Bupati (pjs) Touna yang mendukung penunjukan Togeana sebagai TWA.

Surat usulan ini dianggap sebagai kejutan sekaligus membingungkan bagi staf CII di Palu. Masalahnya, kantor CII Palu saat itu sedang memulai pengembangan DPL sebagai bentuk konservasi alam oleh masyarakat. DPL ini direncanakan akan disahkan dalam sebuah Perda sehingga masyarakat kepulauan Togeana memiliki landasan hukum untuk mengelola sebuah area laut untuk pemanfaatan dan perlindungan. Apabila menjadi kawasan konservasi, maka kepulauan Togeana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam pengelolaannya. Kondisi ini sesungguhnya justru menyulitkan pengembangan DPL, terutama dalam hal kewenangan masyarakat. Di sisi lain, CII Palu merasa bahwa surat gubernur merupakan bagian dari tujuan CI secara global, yaitu *prtoted area establised*. Oleh karenanya, staf CII Palu tak terlalu menanggapi surat tersebut.

Akan tetapi, kondisi dilematis justru muncul setelah Dinas Kehutanan Propinsi Sulteng atas nama Gubernur mengirim surat kepada CII kantor Palu, dengan tembusan kepada Direktorat Jendral PHKA dan Vice Presiden CI Indonesia Jatna Supriatna di Jakarta. Dalam surat tersebut gubernur meminta CII

membantu proses penetapan kepulauan Togean sebagai TWA, termasuk di dalamnya penyediaan data-data keanekaragaman hayati.

Untuk menanggapi hal ini, staf CII Palu mencoba berhati-hati. Beberapa informan di kantor Gubernur menyebutkan bahwa usulan menjadi TWA pada dasarnya adalah untuk mengukuhkan secara hukum bahwa kepulauan Togean adalah milik Sulteng. Dengan demikian, tak ada alasan bagi Gorontalo mengaku wilayah tersebut secara historis sebagai bagian Gorontalo, apalagi ingin mengambil alih. “Kalau Togean masuk Gorontalo, luas wilayah laut Teluk Tomini jadi berkurang lebih dari separuhnya. Semua masuk Gorontalo”, kata informan yang memiliki hubungan dekat dengan Gubernur ini. Benar atau tidaknya alasan ini menang sulit dibuktikan. Akan tetapi, staf CII Palu merasa bahwa nuansa perebutan BOTT cukup kuat mempengaruhi Gubernur untuk mengeluarkan surat usulan tersebut.

Sebelum benar-benar terlibat dalam proses perubahan status kepulauan Togean ini, CII Kantor Palu mengundang beberapa LSM yang selama ini cukup keras menentang kawasan konservasi di Sulawesi Tengah, terutama Taman Nasional Lore Lindu, seperti jaringan Walhi Sulteng dan JATAM. Diundang pula ketua BKSDA dan salah seorang pejabat di Balai TNLL. Dalam pertemuan ini staf CII Palu menjelaskan posisinya dan surat permohonan Gubernur dan kepala Dinas Kehutanan agar CII membantu proses tersebut. Pertemuan ini juga meminta masukan dari peserta yang diundang tentang apa yang harus dilakukan CII Palu.

Dalam pertemuan tersebut, ternyata dibahas pula isu tentang BOTT. Bagi Walhi dan Jatam, BOTT akan mengundang investasi skala besar dari perusahaan yang akan mengambil sumberdaya alam di teluk Tomini, termasuk kepulauan Togean. Bentuk investasi yang paling dikhawatirkan adalah eksploitasi minyak dan gas. Untuk itu, status kepulauan Togean sebagai kawasan konservasi bisa menjadi ‘tameng’ atau ‘bemper’ yang melindungi kepulauan Togean dari kerusakan alam dan penyingkiran hak masyarakat adat di sana. Dari pertemuan tersebut, CII Palu merasa memiliki keberanian untuk terlibat dalam proses pengubahan status kepulauan Togean. Tak hanya itu, CII Palu juga menitipkan 40 lembar copy surat usulan gubernur untuk dibahas masyarakat dalam Kongres Masyarakat Adat yang dilakukan di kepulauan Togean. CII Palu berharap ada



sikap tegas dari kongres tersebut tentang usulan gubernur ini. CII Palu merasa perubahan menjadi kawasan konservasi akan berdampak kepada bentuk pengelolaan sumberdaya alam di kepulauan Togean oleh masyarakat. Tetapi, hingga usai, Kongres tersebut tidak mengeluarkan sikap apapun. Informan saya yang mengikuti acara tersebut mengatakan bahwa copy surat tersebut telah disebar, namun Toloka, AMAT dan Walhi Sulteng yang hadir saat itu sama sekali tak membahasnya.

Beberapa bulan kemudian, sebuah tim penilai yang dibentuk Dirjen PHKA datang ke Palu untuk mengunjungi kepulauan Togean. Mereka adalah gabungan orang-orang dari PHKA, LIPI, dan CII. Sebelum berkunjung ke Togean, tim ini bertemu dengan beberapa LSM dan pemerintah daerah di Palu. Pada saat pertemuan, salah seorang anggota tim dari PHKA mengusulkan agar Togean menjadi taman nasional. Pertimbangannya adalah, wilayah yang diusulkan terlalu luas untuk sebuah TWA yang hanya ditangani BKSDA Sulteng. Taman Nasional memungkinkan pengelolaan dilakukan oleh sebuah badan tersendiri yang dibentuk Departemen Kehutana sehingga lebih efektif. Selain itu, TWA hanya diperuntukkan bagi kegiatan wisata, sedangkan taman nasional memiliki zona-zona di mana pemanfaatan untuk masyarakat justru diperkenankan. Usulan tersebut ia sampaikan langsung saat bertemu dengan lembaga-lembaga pemerintah, DPRD, dan LSM di Palu, Ampana dan kepulauan Togean. Karena dalam pertemuan-pertemuan tersebut tak ada pernyataan menolak jika Togean menjadi taman nasional, maka tim independen menemui Gubernur dan memintanya untuk mengubah usulan dari TWA menjadi taman nasional. Usulan tersebut pun disetujui oleh gubernur dengan surat perubahan usulan pada tanggal 14 Oktober 2004.

Staf CII Palu sangat terkejut ketika hanya dalam waktu 1 minggu saja ternyata Menteri Kehutanan telah mengeluarkan SK penunjukkan kepulauan Togean sebagai taman nasional seluas 362.605. Penyusutan luasan tersebut dari yang diusulkan adalah hasil upaya terakhir staf CII Palu untuk menghindari konflik ketika menyadari bahwa seluruh daratan di kepulauan Togean awalnya diusulkan menjadi taman nasional. Staf CII menganggap bahwa usulan tersebut sangat tidak masuk akal karena seluruh kebun dan pemukiman akan masuk

sebagai taman nasional dalam status *enclave*. Negosiasi pun dilakukan hingga akhirnya tim penilai menyepakati mengeluarkan hutan dalam status APL dan pemukiman, yang luasnya mencapai lebih dari 40.000 hektar tersebut dari susulan sebagai taman nasional.

Ketika TNKT terbentuk, majalah *Tropika* yang diterbitkan CII menurunkan artikel tentang proses dan alasan mengapa TNKT lahir. Disebutkan pula bahwa CII adalah salah satu yang mengusulkan Togeian menjadi TNKT (*Tropika*, 2004: 10). Berita tersebut ternyata membawa persoalan bagi CII Palu setelah Dinas Kehutanan Sulteng kemudian menyampaikan surat resmi berisi protes kepada *Tropika*. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa TNKT lahir karena inisiatif Gubernur Sulteng, bukan CII atau PHKA. Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Sulteng memiliki kepedulian terhadap kelestarian keanekaragaman hayati kepulauan Togeian (*Tropika*, 2005:6). Menanggapi surat ini, CII Palu kemudian menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan pemberitaan tersebut.

Seperti telah diduga sebelumnya oleh staf CII Palu, kritik keras bermunculan setelah TNKT terbentuk. Yayasan Toloka, AMAT, dan Walhi secara bergantian menyampaikan penolakannya terhadap TNKT dengan alasan lahirnya TNKT tak pernah diketahui dan dikonsultasikan dengan masyarakat. Hal yang paling sering dilontarkan adalah CII (kantor Palu) adalah pihak yang paling bertanggungjawab. “Saya punya bukti kuat bahwa CII berada dibalik pembentukan TNKT ini”, kata seorang peserta saat CII dan BKSDA melakukan sosialisasi TNKT tersebut. AMAT, Toloka dan LSM lain di Ampana secara bergantian menyatakan bahwa CII sebagai ‘aktor intelektual’ dibelakang lahirnya TNKT.

Akhirnya, dalam pertemuan itu pula Toloka, AMAT, dan beberapa LSM memohon untuk dimasukkan sebagai anggota forum yang mempersiapkan bentuk pengelolaan kolaboratif TNKT. Dalam sebuah rapat persiapan penyusunan lembaga kolaborasi tersebut, Toloka menyampaikan tiga rekomendasi, yaitu: 1) pengelolaan SDA Kepulauan Togeian dalam konteks TNKT harus dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat; 2) mekanisme pengelolaan Taman Nasional yang lebih mendahulukan biodiversitas sehingga menafikan akses rakyat dalam pengelolaan SDA harus ditiadakan dan harus seimbang; 3)

pengelolaan kawasan TNKT dilaksanakan dengan berdasarkan pada sistem pemanfaatan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat lokal.<sup>5</sup> Bagi staf CII Palu, tiga butir ini adalah yang ingin dicapai. Bedanya, tidak melalui TNKT, melainkan dengan membentuk DPL yang sudah dilakukan di Kabalutan dan Teluk Kilat jauh sebelum TNKT lahir.

## 5.2. Identitas setelah TNKT

Tanggal 10 April 2008, di rumahnya, Rais terlihat gelisah. Ia akan mencalonkan diri sebagai seorang anggota DPRD. Ada beberapa poster yang ia cetak sendiri dengan printer di rumahnya. Terlihat ia Poster tersebut juga sempat saya lihat tertempel di dinding rumah beberapa penduduk yang mendukungnya. Dalam poster, ia terlihat menggunakan pakaian muslim di dampingi isteri dan anak-anaknya yang juga mengenakan busana muslim. Ada slogan-slogan tertulis di poster tersebut, sebagaimana dilakukan oleh banyak politisi di Ampana dan Indonesia saat ini. Salah satu poster menggunakan bahasa Bajo, memberi tahu bahwa Rais adalah putra asli Bajo yang ingin membela orang Bajo.

Rais selalu mencoba menjadi konservasionis. Hubungannya dengan LSM konservasi telah terjadi sejak tahun 90-an, saat YABSHI pertama kali melakukan penelitian di kepulauan Togean. Ia adalah salah seorang yang selama ini sangat aktif bekerja bersama CII dalam pembentukan DPL di Kabalutan. Ia selalu menempatkan DPL sebagai bagian dari usahanya untuk mengubah identitas orang Bajo yang dianggap tercemar akibat *babom* dan *babius*. Sebelum ini, ia tampak bangga jika berbicara tentang DPL di hadapan orang lain. DPL juga telah membuka jaringannya dengan orang-orang di Ampana, terutama yang kini memiliki jabatan di pemerintahan dan partai politik. DPL adalah salah satu hal yang ikut membuka relasinya dengan Bupati Touna, memungkinkannya menginjak kaki di Jakarta dan Manado, bertemu dengan para ilmuwan dari Indonesia dan luar negeri. Rais dan beberapa orang Kabalutan yang ikut membangun DPL adalah orang-orang yang hampir selalu menyatakan mendukung

---

<sup>5</sup> Pada bulan yang sama setelah mengajukan usulan tersebut, sebuah jaringan LSM menolak taman nasional se-Sulawesi di deklarasikan oleh beberapa LSM yang bertemu di Kendari. Salah satu penandatanganan deklarasi tersebut adalah Yayasan Toloka yang menyatakan menolak TNKT.

pembentukan badan kolaborasi pengengolaan TNKT bersama CII. Beberapa LSM menilai Rais, Kabalutan, dan Teluk Kilat adalah pendukung TNKT dan CII.

Tapi, kini ia terlihat begitu gelisah. Dari nada suaranya saya menangkap kesan ia sedang emosional. “Ini memang seperti *susupo* [gosip, omong kosong], mas. Tapi, ini menjadi persoalan. Dorang itu tulis bahwa orang Kabalutan pendukung TNKT, padahal taman nasional akan membuat orang Bajo semakin terpinggirkan. Saya takut ini lebih parah macam Tanjung Keramat. Orang-orang Bajo menjadi susah cari ikan. Saya bisa jamin, kalau kejadiannya seperti itu nanti, saya akan ada paling depan menolak TNKT ini. Makanya, niat saya jadi anggota dewan [DPRD] ini supaya ada orang Bajo duduk di sana, membela sukunya sendiri”, kata Rais pada saya agak emosional. Saya merasa kemarahan itu juga dilimpahkan kepada saya, seorang bekas staf CII yang terlibat dalam proses lahirnya TNKT. “Jadi Rais sekarang bagaimana, mendukung TNKT atau menolak?”, tanya saya. “Kita lihat nanti, kalau orang Bajo jadi korban, saya jelas tolak. Orang Bajo ini kalau sudah disakiti, saya jamin mereka bisa ambil jalan kekerasan. Bisa hancur ini Togean”, kata Rais lagi. “Apa Rais merasa takut kalau karena ini orang Bajo di Kabalutan menjadi membenci Rais, dan membuat mereka tidak memilih Rais saat Pilkada?”, tanya saya. Rais hanya diam, tak menjawab. Saya dan Rais adalah juga sahabat sejak lama. Di antara kami kadang tak ada rasa sungkan ketika membicarakan suatu hal.

Apa yang disebut sebagai *susupo* oleh Rais adalah sebuah selebaran yang dibuat oleh seseorang aktivis LSM di Ampana. Dalam selebaran tersebut dinyatakan tentang perlunya menolak perubahan status kepulauan Togean sebagai taman nasional. Di sebutkan pula dalam selebaran tersebut bahwa orang Bajo yang tergantung pada laut akan semakin dibatasi wilayah penangkapan hasil laut mereka. Selebaran itu juga memberi informasi bahwa taman nasional akan menutup wilayah darat dan laut untuk kegiatan apapun kecuali penelitian. TN Komodo dan Bunaken merupakan contoh yang diangkat sebagai pembanding dengan Togean.

Rais dan Aris (asal Lembanato) pernah bertemu dengan pembuat selebaran tersebut saat di Ampana. Mereka berdiskusi tentang isi selebaran, terutama tentang dampak dari TNKT terhadap akses penduduk di kepulauan Togean. Dari

pertemuan ini, Rais mengaku mulai khawatir dengan TNKT ini, sambil membuat bayangan bahwa orang-orang Bajo di Kabalutan yang semakin sulit mencari hasil laut karena adanya zonasi.

Di Ampana, beberapa teman saya menceritakan bahwa kuatnya LSM lokal dan jaringan Walhi Sulteng menolak TNKT sempat membuat Bupati mengklarifikasi perannya dalam proses pembentukan TNKT. Dalam sebuah surat kabar Bupati Touna menegaskan bahwa ia tak pernah merekomendasikan kepulauan Togean sebagai taman nasional. Dituliskan:

Bupati Tojo Una una, Damsik Ladjalani, mengaku tidak merekomendasikan Togean menjadi areal Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT). "Saya tidak mengetahui, kenapa muncul keputusan dari Menteri Kehutanan (Menhut) yang mengeluarkan keputusan bahwa Kepulauan Togean menjadi TNKT," katanya saat menghadiri pertemuan forum SKPD di ruangan auditorium Pemkab Touna, Rabu (21/3) kemarin.

Dikatakannya, rekomendasi yang diajukannya adalah Kepulauan Togean dibuat Taman Wisata Bahari. Gubernur Sulteng sebelumnya (Aminuddin Ponulele-red) mengajukan hal yang sama yaitu Kepulauan Togean dijadikan Taman Wisata Bahari. Belakangan keluar rekomendasi yang menyatakan bahwa kepulauan menjadi TNKT.

Status tersebut Damsik mengaku, tidak bisa dianulir. Namun, rencana Gubernur Sulteng HB Paliudju akan datang ke Touna awal April tahun 2007 akan diketahui status tersebut. "Pertemuan akan digelar awal April, dan bapak Gubernur akan datang ke sini nanti di situ dibahas tentang status TNKT," katanya (*Radar Sulteng*, Kamis 22 Maret 2007).

Sikap bupati—juga Toloka dan AMAT yang di satu sisi terus menyampaikan penolakan TNKT sementara di sisi lain menjadi anggota forum penyiapan kelembagaan kolaborasi TNKT—telah membingungkan staf CII Palu. Sikap penolakan ini semakin gencar setelah CII menyatakan bahwa kantor dan program mereka di Sulawesi Tengah ditutup.

Mengenai sikap bupati tersebut, seorang informan saya di Ampana yang juga teman dekat bupati, menyatakan adanya tiga kemungkinan mengapa bupati menyatakan hal tersebut. Pertama, bupati merasa bahwa beberapa program kabupaten Touna tak bisa berjalan karena dianggap tidak sesuai dengan status hukum TNKT. Misalnya, saat rencana pembangunan jalan di Batudaka akan dilakukan, kepala Balai TNKT menolak proyek tersebut karena sebagai jalan memasuki wilayah TNKT yang menjadi kewenangannya. Atas kasus ini bupati sempat menyatakan bahwa Kepulauan Togean adalah wilayah Touna dan ia salah satu yang mengusulkannya, mengapa justru sekarang ia tak memiliki wewenang

atas Togean. Kemungkinan kedua, bupati tak mengerti apa perbedaan dan persamaan TWA dan TNKT. Menurut informan saya ini, TWA atau TNKT sama-sama kawasan konservasi yang pengelolaannya berada di bawah pemerintah Pusat. Keduanya juga memiliki zonasi dan pembatasan dalam pemanfaatannya. Kemungkinan ketiga, terkait dengan mendekatnya pilkada di mana bupati akan mencalonkan diri kembali sebagai bupati. Isu bahwa TNKT akan menyengsarakan masyarakat telah semakin kuat, terutama setelah CII tak ada lagi. Hal ini mengkhawatirkan Bupati karena jika sebagian besar masyarakat akan membencinya karena ia telah beberapa kali menyatakan mendukung TNKT dan mengaku sebagai salah seorang yang merekomendasikannya. Selain itu, bupati khawatir jika isu penolakan TNKT ini akan menjadi bahan bagi lawan politiknya untuk menurunkan popularitasnya di mata masyarakat kepulauan Togean. Ia khawatir label sebagai ‘pendukung kawasan konservasi TNKT’ akan membuat masyarakat takut memilihnya kembali.

Informan saya hanya berasumsi. Tetapi kemungkinan-kemungkinan yang ia kemukakan adalah pemahamannya atas perkembangan politik dan isu penolakan TNKT yang ia amati selama itu. Bagi saya, TNKT telah menjadi semacam konteks yang konstitutif dalam membangun identitas demi kepentingan politik. Artinya, TNKT ini, manakala mampu membuat masyarakat mendukungnya, maka aktor-aktor yang berkepentingan akan mengartikulasikan diri sebagai ‘pendukung’ kawasan konservasi TNKT. Akan tetapi, jika TNKT akan membuat masyarakat kepulauan Togean marah dan menolak, maka sebagian aktor akan menampilkan identitas mereka sebagai ‘penentang’ TNKT.

Mengapa dalam konteks pilkada dikotomi antara ‘mendukung’ dan ‘menolak’ TNKT ini menjadi sangat relevan untuk dikembangkan sebagai wacana dalam relasi kekuasaan para aktor? Informan saya menyatakan analisisnya: “Mas Jaya ingat pada pilkada 2004 lalu? Semua pasangan calon berasal dari dua wilayah, yaitu daratan [Tojo dan Ampana] serta ‘pulo’ [kepulauan Togean]. Ini kombinasi yang paling kuat. Makanya Damsik menang karena wakilnya dari daratan. Susah menang kalau saat itu wakilnya dari pulo juga. Kalau calon bupati dan wakilnya hanya daratan atau pulo saja, pasti lemah dan kalah. Pilkada nanti

pasti begitu juga. TNKT jadi menarik buat Pilkada, karena penduduk pulo banyak dan potensial untuk dapat suara”.

Saya sulit menganggap pernyataan informan ini sebagai sebuah kebenaran atau bukan, atau hanya sesuatu yang ia bayangkan. Yang jelas ia telah mengaitkan isu TNKT dengan kepentingan politik menjelang Pilkada. Di sini identitas sebagai orang pulo dan orang darat menjadi penting sebagai koalisi politik. Identitas tersebut menemukan persinggungannya ketika TNKT terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat kepulauan Togean ke depan, sebuah hal yang mendasar bagi hampir seluruh penduduk di sana. Ketika terakhir ke Ampana bulan April 2008 lalu, saya menemukan beberapa aktivis LSM yang selama ini menolak atau mendukung TNKT mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPRD Touna. Sebagian dari mereka yang saya kenal memang mulai bersikap ragu terhadap TNKT, sebagian lagi secara jelas berbalik sikap menentang TNKT dengan alasan demi membela hak-hak masyarakat Togean yang akan tersingkir oleh TNKT.

Rais, Bupati, dan beberapa aktivis LSM yang telah saya kenal memiliki kepentingan terhadap TNKT, tergantung pada konteks apa kepentingan tersebut mereka letakkan. Melihat semua ini saya mencoba memahami sisi lain dari sebuah taman nasional dan bagaimana kaitannya dengan konstruksi identitas sosial seseorang. Bagi saya, taman nasional sebagai kawasan konservasi bukan hanya sekedar *nature virtualism* (Paige West, J. Igoe, dan D. Brockington, 2006). SK Menteri Kehutanan soal TNKT adalah bentuk tekstual dari taman nasional sebagai sebuah cara memandang alam. Balai TNKT adalah instrumen dengan apa potensi kekuasaan dalam SK Menteri itu harus dipraktekkan.

Taman nasional, adalah juga sebuah kondisi tentang ‘alam’ yang secara sosial dapat dibangun, bersifat kontekstual, dan menjadi simbol yang atributif bagi pembentukan identitas seseorang dalam relasi sosialnya dengan orang lain. Taman nasional adalah bagian dari konservasi. Cara pandang tentang konservasi dan taman nasional tidak hanya bergantung pada pengetahuan seseorang tentangnya. Kasus-kasus tentang hubungan antara konservasi dan masyarakat lokal di taman nasional Lore Lindu, Komodo atau Bunaken adalah sejarah-sejarah yang dimunculkan sebagai cara untuk membentuk pengetahuan tentang TNKT.

Di kepulauan Togean, konservasi adalah CII. CII adalah DPL, dan DPL adalah Rais atau Aris. Keduanya adalah orang Bajo dan orang Bobongko, orang Kabalutan dan Lembanato. Taman nasional adalah CII, sekaligus pula konservasi. Ketika memahami TNKT dipengaruhi oleh pengetahuan historis tentang Lore Lindu, Bunaken atau Komodo, atau penolakan mungkin saja terjadi dan beberapa orang akan menghindari untuk diidentikkan dengan TNKT. ‘Pendukung’ dan ‘penentang’ TNKT adalah identitas yang lahir di dalam masalah konservasi alam. Keduanya tidak bersifat permanen, tergantung pada konteks apa itu akan diartikulasikan.

Sore hari di bulan April 2008, Kepala Balai TNKT, dalam ruangan kerjanya, menunjukkan sebuah proposal permohonan dana untuk kegiatan penanaman pohon dalam rangka Hari Lingkungan sedunia. “Mas Jaya kenal orang-orang ini? Mereka minta 90 juta lebih hanya untuk tanam pohon. Tidak masuk akal. Saya harus bagaimana? Kasih [dana] atau tidak?”, tanya Kepala BTNKT tersebut. Saya membuka lembar demi lembar halaman proposal bersampul hijau ini, warna yang sering dijadikan simbol ‘alam’ oleh para aktivis lingkungan. Pada halaman bagian akhir terlihat sederet nama yang akan menjadi pelaksana acara ini. Saya mengenal hampir semua nama mereka, yaitu orang-orang yang selalu menyatakan dirinya ‘menolak’ TNKT, baik di surat kabar, dalam pertemuan-pertemuan, dan juga pada orang-orang kepulauan Togean. Bahkan, salah seorang di antaranya adalah penulis selebaran yang membuat Rais gelisah. “terserah, bapak”, jawab saya singkat kepada kepala BTNKT yang terlihat bimbang.